



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI
DENGAN MENTERI PERDAGANGAN RI
DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN
DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
(PERSERO)/ID FOOD, DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG, DAN
DIREKTUR UTAMA PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

- Tahun Sidang : 2023 – 2024
Masa Persidangan : IV (Empat)
Rapat Ke- : 3 (Tiga)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 13 Maret 2024
Waktu : Pukul 11.08 s.d. 14.01 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI,
Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jend. Gatot Subroto,
Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Aria Bima
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PDIP)
- Acara : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Sekretaris Rapat : 1. Persediaan pangan, stok dan harga pangan; dan
2. Lain-Lain
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
31 dari 55 orang Anggota, dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDIP)**

11 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Adisatrya Suryo Sulisto
3. Prof. Assc. Dr. Darmadi Duriyanto, S.E.,
M.B.A.
4. Rieke Diah Pitaloka
5. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
6. Ir. Deddy Yevry Hanteru Sitorus, M.A.
7. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
8. Sondang Tiar Debora Tampubolon
9. dr. H. Mufti A.N. Anam
10. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.
11. I Nyoman Parta, S.H.

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-PG)**

5 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
2. Ir. H. Mohamad Idris Laena
3. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
4. Nusron Wahid
5. Drs. H. Dadang S. Muchtar

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA (F-P.GERINDRA)**

4 dari 8 orang Anggota

1. Mohammad Hekal, M.B.A.
2. H.M. Husni, S.E., M.M.
3. Khilmi
4. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(F-P.NASDEM)**

2 dari 6 orang Anggota

1. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
2. H. Subardi, S.H., M.H.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F-PKB)**

3 dari 6 orang Anggota

1. Faisol Riza, S.S
2. Ir. H. M. Nasim Khan
3. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muslim, SHI., M.M.
3. Hj. Melani Leimena Suharli

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(F PKS)**

2 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)**

2 dari 4 orang Anggota

1. Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)**

0 dari 2 orang Anggota

-

B. UNDANGAN:

1. Menteri Perdagangan RI (Zulkifli Hasan)
2. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD (Frans Margana Tambunan)
3. Direktur Utama Perum Bulog (Bay Krisna Murti)
4. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (Muhammad Abdul Gani)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

PT Rajawali Nusantara Indonesia, ID Food, dan dengan Dirut Perum BULOG, dan dengan Dirut PTPN III, Masa Sidang ke-IV Tahun Sidang 2023-2024. Rabu, 13 Maret 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu,

Yang terhormat Pimpinan, dan Kawan-kawan Anggota Komisi VI DPR RI, Selamat datang kami ucapkan kepada Yang terhormat Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, beserta jajarannya,

Yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Raja Nusantara Indonesia/ ID Food, Bapak Frans Margana Tambunan, beserta jajarannya, dan Selamat datang saya ucapkan kepada Yang terhormat Saudara Direktur Perum BULOG, Bapak Bayu Krisna Murti, beserta jajarannya, serta Yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III, Bapak Muhammad Abdul Gani, beserta jajarannya, serta Hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan dan rapat dengar pendapat tentunya dalam keadaan sehat *walafiat* dalam suasana bulan suci Ramadhan, bulan yang istimewa bagi umat Islam. Istimewa karena sejak, sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, Saudara-saudara menjalankan ibadah puasa, menahan rasa lapar dan menahan hawa nafsu. Marhaban yaa Ramadhan. Saya ucapkan selamat

menunaikan ibadah puasa Ramadhan, semoga dalam suasana Ramadhan Saudara-saudara bisa menjalankan ibadah puasa dalam hati yang bersih dan suci.

Bapak-Ibu dan Hadirin yang saya muliakan,

Menurut laporan Sekretariat Komisi VI DPR RI, Rapat pada hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 15 anggota, 10 izin, 8 fraksi. Dengan demikian forum telah terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 281 Peraturan DPR Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 276 ayat (1).

Maka dengan keinginan kita untuk memaknai bagaimana mandat rakyat yang diberikan pada kita yaitu, tetap melindungi segenap tumpah darah Indonesia termasuk melindungi daya beli masyarakat kita dalam hal yang terkait dengan kebutuhan pangan, dan dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim* maka rapat saya buka dan terbuka untuk umum.

Setuju?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.08 WIB)

Sebelum saya memulai rapat, ada anggota baru yang bisa saya perkenalkan dari Komisi VIII ke Komisi VI, yaitu H. M. Husni, S.E., M.M. dari Partai Gerindra.

F-P.GERINDRA (H. M. HUSNI, S.E., M.M.):

Assalamualaikum,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Silakan memperkenalkan dari dapil mana, Pak.

F-P.GERINDRA (H. M. HUSNI, S.E., M.M.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI dan seluruh jajaran,
Yang saya hormati teman-teman Komisi VI dan seluruh jajaran,
Yang saya hormati Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan seluruh jajarannya,
Ada Direktur PTPN III yang saya hormati,
Yang saya hormati dari Direksi Perum BULOG, dan
Yang saya hormati dari RNI dan seluruh jajarannya,**

Perkenalkan nama saya H. M. Husni, S.E., M.M., Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Kemarin, saya di Komisi VIII, *alhamdulillah*

perkenalkan, mudah-mudahan saya diterima dengan baik di sini, di Komisi VI. Selamat berkenalan, saya akhiri.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Asaslamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Perkenalan anggota baru Komisi VI. Iya, nanti kita persilakan sambil memaparkan untuk mengenalkan diri.

Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Setelah persetujuan rapat terbuka, saya minta persetujuan rapat hari ini akan kita selesaikan jam berapa? Satu?

(RAPAT: SETUJU)

Karena beberapa juga ada undangan ke komisi yang lain.

Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara, Saudara Dirut Perum BULOG dan Saudara Dirut PT, Dirut PTPN III, atas kesediaan waktunya untuk hadir pada rapat hari ini. Dan sesuai dengan undangan yang kami sampaikan, agenda rapat hari ini untuk membahas mengenai ketersediaan pangan, stok dan harga pangan, serta kalau ada tambahan yang lain. Rapat hari ini tidak lepas juga dari eh wacana publik yang kita lihat dari media, baik itu media cetak, media *online*, maupun di media sosial tentang beberapa hal yang terkait dengan situasi pangan nasional.

Seperti yang kita ketahui bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan berbangsa, bahkan beberapa negara melihat pangan sudah menjadi komoditas pertahanan, tidak masuk di dalam *B to B*, tapi lebih pada hubungan *G to G*. Pasca pandemi Covid-19, seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia menjadikan konsep ketahanan pangan menjadi prioritas utama yang harus dicapai. Kondisi geopolitik yang tidak stabil serta ancaman cuaca, cuaca ekstrem akibat *global warming* mendorong setiap negara di dunia untuk dapat berdaulat memenuhi kebutuhan pangan sendiri dengan tidak menyandarkan pangan impor atau memperkecil kebutuhan pangan nasional dengan pangan impor.

Kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri, kondisi tersebut juga menyebabkan beberapa negara membatasi ekspor komoditas pangan demi memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negara masing-masing. Globalisasi sektor pangan mulai tidak lagi menjadi sesuatu cara pandang dalam sistem perdagangan global. Masing-masing negara mengedepankan

nasional *interest*-nya ya daripada memenuhi prasyarat-prasyarat untuk sistem globalisasi sektor pangan.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan ketahanan pangan masuk dalam agenda pembangunan nasional tahun 2022-2024, bahkan lebih tegasnya, kedaulatan pangan, pertahanan, ketahanan pangan dalam konsepsi ketahanan pangan, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dengan produk pangan sendiri. Prioritas dari pemerintah di sektor pangan adalah meningkatkan ketersediaan akses, serta kualitas pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, seluruh pihak, termasuk di dalamnya adalah pemerintah dan BUMN, harus mampu mendukung dan saling berkolaborasi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Di tengah bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, persoalan ketersediaan dan stabilitasi harga pangan menjadi sangat krusial. Mengingat di masa-masa ini, kebutuhan pangan masyarakat Indonesia lebih tinggi, "perlu dikaji lebih dalam" dibanding hari-hari biasa.

Dilaporkan bahwa terjadi kelangkaan beras yang merupakan bahan makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia, sementara itu di beberapa komoditas pangan lainnya juga mengalami kenaikan harga. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah bersama-sama dengan pihak terkait lainnya perlu mengimplementasikan serangkaian strategi untuk menjamin ketersediaan sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas pangan, khususnya di bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada rapat kerja kali ini, Komisi VI DPR RI ingin mengetahui serealistisnya, data yang sebenarnya terkait perkembangan kondisi persediaan dan harga komoditas bahan pangan pokok dan barang penting lainnya termasuk di dalamnya adalah strategi-strategi, cara menyikapi ya, cara mencari bagaimana hal-hal yang perlu diambil di dalam keputusan-keputusan Kementerian BUMN, bahkan kalau penting, kalau perlu adalah keputusan-keputusan politik di tingkat DPR. Semuanya itu untuk menjamin ketersediaan, serta stabilisasi harga bahan pangan pokok, khususnya sekali lagi, di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

Dalam rapat kerja kali ini, kita undang selain Kementerian Perdagangan, turut hadir juga dari BUMN-BUMN yang bergerak di bidang pangan, antara lain: PT Rajawali Nusantara, PT, eh mohon maaf, Perum BULOG dan PT Perkebunan Nusantara III *holding*, yang akan juga memaparkan, kami beri kesempatan cara menyikapi dalam strategi-strategi terkait dengan ketersediaan termasuk harga pangan dalam cara pandang BUMN-BUMN terkait. Tentunya ini dalam kurun waktu jangka pendek maupun jangka panjang, tentunya ini dalam rangka dukung pencapaian ketahanan pangan nasional termasuk di dalamnya adalah strategi kolaborasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilakan kepada Saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan persoalan ketahanan pangan nasional, yang nantinya akan kami persilakan untuk dilanjutkan paparan oleh PT Rajawali Nusantara/ID Food, Perum BULOG dan PT Perkebunan Nusantara III.

Untuk itu kami persilakan, Menteri Perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Para Ketua,
Wakil Ketua Komisi VI yang terhormat,
Ibu-Bapak Anggota Komisi VI yang terhormat,**

Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji syukur Allah *subhanahu wa ta'ala*, hari ini kita bisa melaksanakan rapat kerja bersama-sama dalam keadaan sehat *wal'afiat* dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadhan bagi yang melaksanakan.

Selanjutnya, kami menyampaikan, di sini juga hadir bersama saya ada Dirut BULOG, Mas Bayu, ada Pak Gani-Dirut PTPN III, kemudian Dirut RNI bersama kita tentunya, juga seluruh peran dari seluruh teman-teman Eselon I Kementerian Perdagangan.

Kami menyampaikan terima kasih atas undangan dari Komisi VI DPR RI untuk melakukan rapat kerja dalam rangka pembahasan persediaan pangan, stok dan harga pangan, serta isu penting lainnya.

Dapat kami sampaikan bahwa inflasi pangan relatif terkendali pada awal 2024, namun pemerintah terus mengantisipasi kecenderungan secara historis, inflasi yang meningkat setiap periode Ramadhan-Idul Fitri. Pada bulan Februari 2024 terjadi inflasi secara bulan sebesar 0,737% *month to month*, inflasi tahun ke tahun, Februari 2024 dibanding Februari 2023 *year on year* sebesar 2,75% masih dalam sasaran inflasi 2 sampai 4%. *Volatile food* pada Februari 2024 mengalami inflasi secara bulanan sebesar 1,53% dan 8,47% secara tahun ke tahun. Komoditas protein hewani seperti ikan, telur ayam, daging ayam, daging sapi, cenderung memberikan andil inflasi pada bulan perayaan Lebaran dengan tambahan beras yang mencatat andil inflasi tertinggi pada tahun 2023.

Selanjutnya, berdasarkan data Bank Indonesia, ekspektasi harga barang diperkirakan meningkat pada Maret 2024, indeks ekspektasi harga

umum Maret 2024 sebesar 137,2 meningkat dari Februari 2024, yang sebesar 129,3. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh momen cuti bersama dan sekolah, kecenderungan konsumsi yang meningkat dan daya beli yang menguat.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia terus memantau perkembangan ketersediaan harga barang, kebutuhan pokok secara *online*, dan harian melalui sistem SP2KP, di lebih dari 600 pasar rakyat yang tersebar di 503 kabupaten/kota, 38 provinsi di seluruh Indonesia, pemantauan barang kebutuhan pokok di pasar rakyat tersebut menjadi indikasi awal kondisi stabilisasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, sehingga dapat dijadikan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi di level yang telah ditargetkan.

Berdasarkan pantauan harga di SP2KP per 8 Maret 2024, terdapat beberapa komoditas yang perlu kita waspadai, di mana tercatat harga rata-rata nasional menunjukkan tren kenaikan atau telah di atas harga eceran tertinggi, yakni beras, minyak goreng, minyak goreng curah, gula pasir, telur ayam ras dan cabai.

Komoditas beras.

Dampak El Nino menyebabkan pergeseran musim panen. Berdasarkan data KSP Desember 2023, produksi padi Januari-Maret 2024 lebih rendah sekitar 2,82 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Akibatnya harga gabah naik menembus 8.900 per kilo di penggilingan. Harga beras yang tinggi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi harga rata-rata internasional juga stabil tinggi. Larangan ekspor beras India turut menjadi pemicu, beras Thailand per Februari 2024 sebesar 610 US Dollar per ton, naik 32% dari periode yang sama tahun lalu.

Dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga beras, pemerintah melalui Bapanas memberikan relaksasi HET beras premium sebesar Rp1.000,00 per kilo di setiap *region* mulai 10 Maret sampai 23 Maret 2024. Sementara HET beras medium tetap, selanjutnya Satgas Pangan diharapkan bersama-sama melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan implementasi relaksasi HET beras premium yang dimaksud.

Selain itu, pemerintah melakukan penguatan koordinasi pembedahan bersama Perum BULOG dalam percepatan penyaluran SPHP Januari-Maret 2024 sesuai target 250.000 ton per bulan. Percepatan realisasi impor untuk kebutuhan stok CBP menjelang HBKN dan pengawasan intensif melalui pemantauan stok beras di penggilingan, distributor, dan retail modern.

B. Komoditas minyak goreng program minyak goreng rakyat.

Berdasarkan data Kemendag, realisasi DMO hingga akhir Februari 2024 sebesar 123.536 ton, baru mencapai 41,2% dari target pemenuhan 3.000 ton. Sisi positifnya adalah proporsi Minyak Kita terjaga di atas 40%, dengan proporsi pada kondisi curah 56.952 ton dan Minyak Kita 66.550 ton dari total pasokan. Namun, kenaikan harga minyak goreng curah tidak dapat dihindari akibat menurunnya realisasi distribusi DMO minyak goreng curah. Hal tersebut merupakan imbas dari masih lesunya ekspor CPO dan produk turunannya, sehingga demo yang dilakukan produsen sedikit menurun dibandingkan bulan yang lalu.

Kondi, komoditas telur ayam ras.

Posisi peternak daging dan telur ayam ras berada dalam kondisi yang sulit akibat kenaikan harga jagung. Defisit pasokan jagung secara bulanan pada Januari-Februari 2024 sekitar 600.000 ton yang berdampak pada kenaikan harga jagung pakan di tingkat peternak nasional 8.630 per kilo atau naik 10,06% dari bulan lalu. Namun demikian, seiring dengan masuknya musim panen, pada awal bulan Maret 2024 saat ini, mulai terjadi penurunan harga beli jagung di tingkat peternak menjadi 6.200, 3 hari yang lalu sudah turun 5.200. Saya *ngecek* ke Charoen Pokphand, mereka beli jagung sudah 5.200, sehingga diharapkan akan mengoreksi harga biaya pokok produksi di tingkat peternak.

Beberapa upaya untuk stabilisasi harga pakan di tingkat peternak, antar lain: penugasan importasi sebesar 500.000 ton jagung. Ini, sekarang sudah masuk panen raya, jadi kalau masuk sekarang sebetulnya akan merugikan petani dan ini kita akan bahas lagi, Pak. Untuk disalurkan ke pabrik pakan, melakukan percepatan distribusi SPHP jagung pakan oleh Perum BULOG per minggu 1 Maret 2024, realisasi BHP jagung pakan kepada peternak, UMKM sebanyak 196.000 ton dari total pagu 2023, pemasukan gandum penugasan sebesar 5.000 ton sebagai alternatif jagung oleh PT Berdikari guna meningkatkan produksi pakan.

Komoditas cabai.

Karena harga cabai disinyalir karena penurunan pasokan di beberapa sentra produksi, dampak cuaca hujan ekstrem di beberapa wilayah sentra. Diprediksi pasokan akan normal pada periode Lebaran sehingga harga akan menuju level di bawah, di bawah harga acuan. Beberapa upaya stabilisasi harga cabai, antara lain: penguatan koordinasi bersama dinas teknis, *sharing* data dan informasi komoditas, optimalisasi pemanfaatan anggaran BTT dan fasilitasi perdagangan komoditas antar wilayah, antar pulau dari wilayah produksi ke wilayah konsumsi.

Bapak-Ibu, Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Kemendag bersama kementerian terkait telah mengundang para produsen minyak goreng untuk dapat memastikan produsen agar tetap memenuhi distribusi DMO sesuai alokasi masing-masing perusahaan, terutama dalam rangka mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang

puasa dan Lebaran tahun 2024. Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka memastikan stabilisasi harga dan pasok minyak goreng rakyat, Minyak Kita, minyak curah, mempertahankan HET setidaknya sampai momen Idul Fitri 2024 berakhir. Pelaku usaha diminta tetap memenuhi distribusi DMO sesuai alokasi masing-masing perusahaan. Target DMO pada momen puasa dan Idul Fitri tetap 300.000 ton. Dan Kemendag bersama kementerian/lembaga akan melakukan pengawasan terpadu lebih intensif untuk memastikan kebijakan minyak goreng rakyat terimplementasi dengan baik di lapangan.

Pemerintah secara bersama-sama selalu berkolaborasi dan bersinergi. Pada 4 Maret 2024 telah melaksanakan rakor HBKN bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pelaku usaha pangan. Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan barang pokok menjelang puasa dan Idul Fitri 2024, di antaranya: mengintensifkan pemantauan dan sinergi pengawasan, mengoptimalkan intervensi pasar secara masif, memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan, memastikan kelancaran distribusi pasokan, komunikasi positif terhadap ketersediaan bahan pokok kepada masyarakat.

Menindaki, menindaklanjuti rakor tersebut, Kementerian Perdagangan juga telah himbauan kepada pemerintah daerah, di antaranya,

- mengoptimalkan skema kerja sama perdagangan antar daerah dalam memenuhi pasokan barang kebutuhan pokok dan memberikan bantuan distribusi jika diperlukan,
- membantu program pemerintah seperti SPHP beras dan DMO minyak goreng,
- meningkatkan pemantauan ketersediaan harga dan pengawas pelaku usaha barang kebutuhan pokok,
- mengkomunikasikan kecukupan pasokan barang kebutuhan pokok secara masif kepada masyarakat.

Untuk pelaku usaha, Kementerian Perdagangan menghimbau agar:

- mempersiapkan penambahan pasokan dan stok guna mengantisipasi, peningkatan permintaan,
- mengambil keuntungan secara wajar dan tidak melakukan spekulasi harga dan penimbunan,
- memenuhi kewajiban DMO bagi asosiasi dan produsen minyak goreng.

Pemerintah senantiasa berkembang untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga harga barang kebutuhan di tingkat yang wajar sehingga masyarakat dapat menunaikan ibadah dengan tenang, khusus, pada bulan puasa dan Idul Fitri tahun ini.

Pak Pimpinan dan Anggota DPR yang terhormat,

Secara ringkas, kenaikan harga telur, harga ayam, dan beras, akibat El Nino musim kemarau yang panjang sehingga musim tanamnya bergeser, Pak, ya, Pak. Jadi harusnya kita Januari–Februari sudah panen raya, nah ini panen rayanya mundur kira-kira, sekarang sudah, tapi belum panen raya,

kemungkinan April dan Mei, ya, jadi panen rayanya April–Mei, Pak. Nah, akibat musim tanam yang bergeser itu maka beras lokal ya kurang, Pak, *wong* enggak *nanam*, Pak, karena musim panas. Kalau tanam sedikit, yang punya apa namanya, bendungan saja, irigasi yang kuat saja. Jadi musimnya tanamnya bergeser, panennya, panennya bergeser, tidak hanya kita, ini seluruh dunia, *gitu*.

Nah, akibatnya pemerintah itu melakukan langkah-langkah cepat, kita impor beras, besar, Pak. Tahun lalu 3,6, Pak, ya? Izinnya terlaksana hampir 3 juta. Jadi berasnya banyak, tahun ini kita sudah sepakati juga hampir 3 juta *gitu*. Oleh karena itu, pasar dibanjiri oleh BULOG beras SPHP dan beras medium, yang harganya dijamin pemerintah. SPHP itu harganya 11.000 lebih kurang ya, Pak? kurang sedikit per kilo. Ada terus, Pak, beras medium harganya 14.000. Jagung karena produksinya mundur, tanamnya mundur, panennya mundur, kemarin sampai 8.000, Pak, harganya, *gitu*. Memang kita harapkan publik, masyarakat, bisa menggeser, membeli beras SPHP dan membeli beras medium BULOG. Tapi biasa, ibu-ibu kan *ndak* mau, Pak, “Rasanya beda, Pak”, kecuali sudah terpaksa sekali, *gitu*. “Bu, *kan* ada beras BULOG, enak, berasnya bagus”, “Wah beda, Pak, rasanya lain, kami tetap Rojo Lele”, begitu. Nah, yang dibeli beras lokal, berasnya belum panen, ya harganya tambah naik, Pak. *Wong* belum panen, panennya nanti, panen rayanya April–Mei *gitu*. Nah, sekarang sudah mulai panen, sudah mulai agak turun sedikit, April akan lebih banyak panennya, Mei panen raya.

Jagung, Pak, 8.000 sekarang sudah, kemarin saya ke petani jagung, saya ke pabrik Charoen Pokphand itu, jagung sekarang sudah 5.200 di pabrik apa, pakan ternak. Jadi terima di pabrik itu 5.200, itu yang mitra, Pak, itu yang mitra. Kalau tidak mitra, lebih murah lagi. Oleh karena itu sekarang harga jagung di rakyat sekarang antara 3.000–4.000, dan rugi, Pak, kalau sudah 3.000. Kalau lihat sekarang menanam jagung, siring-siring tanam jagung, karena kemarin 8.000. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga minta kepada BULOG, jagung kita jangan impor dulu. Kalau tidak, ya petaninya kasihan, karena sekarang akan panen raya, Pak, mulai panen raya, sekarang. Panen besar-besaran akibat kemarin harga 8.000, seluruh masyarakat tanam jagung, *gitu*. Sekarang jagung di rakyat sudah mulai antara 3.000–4.000, tadi saya bilang kepada Pak BULOG, “Tolong BULOG beli 4.200, petani sudah senang” *gitu*, karena sekarang sudah mulai panen raya, Pak. Itu kira-kira intinya, Bapak.

Jadi oleh karena itu sekarang harga telur sudah *under* 32.000, di pasar sudah mulai 31.000, mulai 30.000 ya. Ayam dari 43.000, 45.000, sekarang sudah mulai turun, sudah mulai menginjak angka 39.000. Karena pakan itu, pakan tuh 50% dari jagung, 50% pakan itu jagung. Jadi kalau jagung naik, pakannya naik, tentu harga telur dan harga ayam naik.

Demikian penyampaian secara singkat mengenai ketersediaan pangan, stok dan harga pangan. Izinkan pula kami pada kesempatan ini memohon dukungan kepada seluruh Pimpinan, Anggota Komisi VI DPR RI terhadap kebijakan Kementerian Perdagangan tahun 2024.

Akhir kata, sekali lagi kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang telah mendukung program pemerintah selama ini.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Terima kasih, Saudara Menteri Perdagangan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA/ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN, S.P.):

Baik, terima kasih, Pak Pimpinan.

Selamat siang,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang kami hormati, Bapak Pimpinan Komisi VI DPR RI,
Bapak-Ibu Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang kami hormati Bapak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan,
Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Perdagangan, Pak Jerry Sambuaga, beserta jajaran Kementerian Perdagangan,
Yang kami hormati Dirut BULOG, Pak Bayu Krisnamurthi beserta jajaran,
Dirut PTPN III, Pak Muhammad Abdul Ghani beserta jajaran, dan
Bapak-Ibu semua yang hadir hari ini,**

Kami akan menyampaikan paparan terkait ketersediaan pangan, stok dan harga pangan. Bisa ditampilkan? Sebelumnya juga kami mengucapkan selamat beribadah puasa bagi Bapak-Ibu yang melakukan ibadah puasa, semoga ibadahnya dilancarkan sampai akhirnya nanti.

Berikutnya, *next*.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VI DPR RI,

Kami selaku *holding* pangan yang salah satu tugasnya juga adalah menjaga beberapa komoditas pangan penting terlebih beberapa produk yang terkait dengan Perpres 125 Tahun 2022 yaitu terkait Cadangan Pemerintah secara Rutin, kami juga memantau ada 12 komoditi yang tercantum dalam Perpres 125, yang di mana 9 adalah menjadi tugas dari ID food, 3 menjadi tugas BULOG yaitu beras, jagung, kedelai. Sembilan komoditi yang menjadi

pantauan kami adalah gula, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, bawang merah, telur, kemudian ikan kembung, cabai rawit merah, ikan tongkol dan cabai merah keriting. Dan setiap hari dengan data yang kami dapat dari Badan Pangan, kami melakukan pantauan terhadap komoditas harga tersebut.

Next. Untuk kesiapan stabilisasi stok sepanjang 2024, kami juga sudah menyiapkan beberapa program dan stok sepanjang tahun, di mana stok-stok tersebut ada yang berasal dari tiga sumber, yaitu adalah produksi dari ID Food sendiri, yaitu seperti di gula dan di garam. Ada juga yang kami *off take* dari para petani, peternak, dan ada juga yang kami dapatkan dari penugasan yang kami dapatkan, seperti misalnya penugasan importasi seperti gula dan daging.

Ini adalah beberapa produk yang kami siapkan tahun 2024 Bapak-Ibu, seperti gula kristal mentah, minyak goreng, sapi hidup, daging ayam, gula kristal putih, daging sapi Brazil, telur ayam, garam, bawang putih, daging sapi Australia dan ikan. Namun, kami sampaikan memang sampai *update* sampai saat ini yang tersedia di bulan puasa, Lebaran saat ini adalah seperti minyak goreng kami sudah siapkan kurang lebih 5,1 jutaliter yang kami dapatkan produsen dan akan kami distribusikan baik secara lewat distributor dan juga lewat beberapa gerakan pasar murah.

Untuk sapi hidup, kedatangan pertama akan tiba di bulan Maret, yaitu kurang lebih 3.000 ekor untuk ketersediaan puasa, Lebaran. Kemudian yang berasal dari lokal seperti daging ayam dan telur ayam, ini kami *off take* dari para peternak mandiri yang akan kami gunakan di beberapa program yang akan kami sampaikan berikutnya. Sedangkan ada beberapa penugasan, memang kami saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN, seperti untuk gula kristal mentah dan bawang putih. Begitu mendapat persetujuan, kami akan segera melakukan pengadaan untuk produk-produk tersebut.

Adapun produk lain seperti daging sapi Australia ini adalah pengajuan secara *b to b* yang sekarang lagi berproses, yang juga kemungkinan nanti akan tiba setelah Lebaran. Ini adalah berapa produk yang juga diatur Perpres 125, yang sebenarnya kami juga mendapat dukungan pendanaan dari Himbara untuk melakukan pembelian produk-produk ini yang sekarang lagi berproses, dengan target kami bisa selesaikan di bulan ini.

Berikutnya.

Bapak-Ibu,

Ini adalah salah satu dari program yang kita adakan selama puasa, Lebaran ini yaitu, program bantuan pangan untuk keluarga rawan *stunting* dengan target 1,4 juta keluarga rawan *stunting* yang ada di 7 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat. Dan untuk tahun ini kebetulan *launching*-nya akan kami lakukan di minggu ini, pertama di Jawa Barat, nanti

di hari Jumat. Satu koma empat juta penerima manfaat ini akan mendapatkan 1 *pack* telur yang isinya 10 butir, kemudian 1 *pack* daging ayam yang beratnya kurang lebih 1 kilo. Program ini adalah program lanjutan yang sudah kami laksanakan sejak tahun lalu. Dan dalam program ini kami juga bermitra dengan para peternak mandiri dan kami jamin, melaporkan, Pak Pimpinan, Pak Menteri, bahwa semua *off take* yang kita lakukan untuk telur dan daging ayam, kita lakukan sesuai dengan harga acuan pembelian pemerintah, *even* harga pasar jatuh, kami tetap membeli sesuai dengan acuan pemerintah. Jadi kalau harga jatuh, kami tetap beli di atas. Seperti untuk saat ini, kami membeli telur di posisi 29.000 dan daging ayam di posisi 34.000. Hal ini juga untuk membantu mereka memastikan bahwa produk telur dan daging ayam mereka hasilkan itu tidak dijual di bawah harga produksi mereka.

Berikutnya. Menyambung apa yang disampaikan Pak Menteri, kami juga terlibat dalam gerakan pangan murah di tahun ini, di mana tahun lalu, 1 tahun kami ada hampir 400 titik dan di tahun ini targetnya lebih. Dan di triwulan 1 ini, titik-titik yang sudah teridentifikasi bagi kami untuk melakukan gerakan pangan murah ada di 100 titik, di 27 provinsi, di mana dalam gerakan pangan murah ini kami juga menyediakan beberapa komoditi kebutuhan pokok seperti gula, beras, kemudian tepung terigu, daging, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, untuk kami jual dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Kalau untuk gula, sesuai dengan HET, 16,5, Bu, kemudian tepung kurang lebih 10 sampai 11.000, semuanya dijual tidak melebihi HET pemerintah, Bu. Itu jaminan. Dan ini juga memang dari prinsip dari gerakan pangan murah ini. Dan ini tidak hanya kami lakukan, tapi juga berkolaborasi dengan beberapa BUMN lain yang juga swasta. Dan saat ini juga sedang berlangsung seperti yang ada di dokumentasi ada di beberapa daerah, seperti di Kebumen, Cianjur, DKI Jakarta, Bogor, Jambi, Sukabumi dan Bandung, yang inisiasinya bisa berasal dari kami, juga bisa berasal permintaan masyarakat.

Kemudian yang kami sampaikan adalah, satu yang kami persiapkan tahun ini, karena mengantisipasi tahun depan, walaupun masih 1 tahun lagi, kuncinya menurut kami adalah bagaimana kesiapan kami, selaku BUMN, bisa meng-*carry over* sebagian stok di akhir tahun untuk dibawa ke awal tahun. Terlebih tahun depan, puasa dan Lebaran akan lebih maju lagi, sehingga kami, masih, Bu, masih. Sehingga kami juga mohon dukungan, saat ini ada satu proses pendanaan yang kami lagi berproses di Himbara, yaitu penjaminan subsidi, yaitu untuk meng-*offtake* 9 komoditi tadi, kami dapat mendapat plafon 5,2 triliun, dengan bunga yang kami bayarkan hanya 4% . Dan jika ini benar-benar kami dapatkan, akan sangat membantu untuk bisa membantu stabilisasi 9 komoditas pokok tadi, termasuk beberapa komoditas pokok yang belum kami laksanakan di tahun lalu, seperti cabai, kemudian bawang, bawang merah, yang *Insyallah* begitu kami dapatkan pendanaan ini, kami bisa lakukan secara rutin untuk bisa meng-*offtake* dan melakukan mobilisasi dengan prinsip memobilisasi dari daerah surplus ke daerah defisit, Pak. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa lebih cepat, karena tahun realisasinya ada di bulan 10, jadi cukup terlambat.

Seperti itu Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Komisi VI, yang kami sampaikan terkait beberapa kesiapan terkait stok dan harga pangan yang ID Food persiapkan untuk tahun ini.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Selanjutnya, kami persilakan Saudara Direktur Utama Perum BULOG, Bapak Krisna, Bayu Krisna.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG (Prof. Dr. Ir. Y. BAYU KRISNAMURTHI, M.S.):

Terima kasih, Ketua.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi VI DPR RI,
Yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia,
Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan seluruh jajaran Kementerian Perdagangan,
Yang kami hormati teman-teman Dirut BUMN yang hadir,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera,

Salam sehat bagi kita semua,

Bapak-Ibu sekalian,

Menambahkan saja apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Menteri, kami bisa sampaikan beberapa hal, yang pertama adalah berdasarkan *monitoring* kami di Perum BULOG. Oh ya maaf, tadi Ibu menanyakan, nama saya Bayu Krisnamurthi, Bu, saya baru 3 bulan menjadi Direktur Utama Perum BULOG. Berikutnya.

Pengamatan kami di beberapa retail ini telah menunjukkan bahwa harga beras di beberapa daerah sudah menunjukkan penurunan dari ada yang turun Rp100,00, Rp500,00, hingga sampai ke Rp1.600,00 dan ini diambil di masing-masing toko retail yang ada dalam pemantauan Perum BULOG. Berikutnya, lanjut, lanjut.

Peran perum BULOG dalam mengamankan HBKN puasa dan Idul Fitri 2024 dimulai dengan menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang cukup dan tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini per hari kemarin, stok beras adalah 1,1 juta ton dan ini belum menyertakan pengadaan yang sudah juga

mulai dilakukan oleh Perum BULOG dari dalam negeri. Untuk komoditas pangan lainnya, stok yang tersedia di BULOG tidak banyak, lebih, lebih banyak dan lebih kuat stoknya di saudara kami di RNI, tapi ada beberapa seperti sedikit tepung terigu, minyak goreng, daging sapi, gula pasir, telur, dan daging kerbau. Berikutnya.

Hal lain yang dilakukan oleh perum BULOG dalam mengamankan HBKN adalah untuk terus melaksanakan tugas pemerintah melakukan penyaluran bantuan pangan, terutama untuk periode Januari sampai dengan April ini, yang saat ini secara keseluruhan 3 bulan, Januari sampai dengan Maret, telah terlaksana sebesar 62,46% atau 420, 412.000 ton ya. Beberapa daerah itu apa namanya, kemarin ada, sedikit lebih lambat dibandingkan dengan yang lain, ini terutama karena ada proses verifikasi dan validasi untuk datanya, tapi saat ini semua telah berjalan dan kita harapkan pada bulan Maret ini target untuk Januari–Maret bisa terlaksana seluruhnya. Berikutnya.

Di samping itu, BULOG juga terus melakukan usaha untuk mengamankan HBKN puasa dan Idul Fitri dengan melanjutkan, melanjutkan penyaluran beras SPHP bersubsidi. SPHP adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dan ini telah terlaksana 420.000 ton selama sampai dengan tanggal 12 Maret, disalurkan ke seluruh apa, seluruh retail dan distributor, ada pengecer, ada sesama BUMN, ada pemda, dan juga yang banyak di distributor. Distributor ini adalah untuk mereka bisa menyalurkan kepada *downliner* mereka. Berikutnya.

Menjawab isu yang kemarin sempat terjadi di kekosongan di retail modern, maka BULOG juga telah menyalurkan beras SPHP ke retail modern, hingga hari ini telah tersalurkan sekitar 13.750.000 ton ke berbagai retail modern, baik di sekitar Jakarta maupun di luar Jakarta. Berikutnya.

Hal lain, ini hanya beberapa gambar saja menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh perum BULOG, mendukung pemda maupun berbagai organisasi masyarakat menyalurkan beras sesuai dengan HET, beras SPHP sesuai dengan HET, di berbagai daerah Indonesia. Berikutnya, terus, terus.

Bapak-Ibu sekalian,

BULOG juga mendukung gerakan pangan murah, ini adalah program yang di, diinisiasi oleh pemerintah dengan menjual beras SPHP sesuai dengan HET di berbagai titik di berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di samping itu juga mendukung pemda dan TPID membangun kios-kios pemantauan bersama di berbagai provinsi. Berikutnya,

BULOG mengambil inisiatif sendiri untuk menjaga harga, membantu masyarakat yang mengalami kenaikan harga beras, dengan apa, melaksanakan sekitar 3.040 kegiatan di berbagai daerah di Indonesia dalam bentuk BULOG Siaga. Ini bentuknya adalah operasi pasar, menjual beras sesuai dengan harga eceran tertinggi. Penjualan SPHP di seluruh Indonesia telah menyentuh 27.000 pengecer di lokasi pasar sebanyak 12.000 pengecer dan di luar pasar sebanyak 15.000 pengecer. Berikutnya.

Di samping itu BULOG juga terus memantau, melihat kondisi pasar dengan melakukan *monitoring* dan *update* kondisi pasar. Berikutnya.

Yang juga kami laporkan pada Bapak Pimpinan Komisi VI dan Bapak-Ibu sekalian adalah saat ini sudah mulai panen dan BULOG sudah mulai mengadakan pengadaan dalam negeri. Hanya saja kami harus laporkan untuk harga beli BULOG, untuk beras, saat ini masih sekitar Rp13.000,00 per kilogram dan gabah masih sekitar 17, Rp7.000,00 per kilogram dan ini masih berada di atas HPP, Bapak Pimpinan. Jadi HPP kita saat ini adalah Rp5.000,00. Dan sehingga dengan demikian BULOG belum bisa melakukan pengadaan secara PSO, tapi masih mengadakan pengadaannya menggunakan pendekatan komersial. Berikutnya.

Untuk yang terakhir, untuk jagung, ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Perdagangan, Januari, Februari dan awal Maret, harga jagung sangat mahal sehingga para peternak membutuhkan bantuan. BULOG telah menyalurkan jagung untuk para peternak kecil di seluruh Indonesia sebanyak kurang lebih 200.000 ton. Dan saat ini BULOG tengah bersiap-siap untuk melakukan pengadaan penyerapan BULOG dalam apa, penyerapan jagung dalam negeri, karena panennya sudah mulai datang. Jadi keseimbangan untuk untuk konsumen maupun produsen terus diusahakan oleh Perum BULOG melalui program-programnya.

Demikian, Bapak Pimpinan, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Direktur Perum BULOG.

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III, Bapak Muhammad Abdul Ghani.

DIREKTUR UTAMA PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

**Yang saya hormati Pimpinan, dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Mendag beserta Pak Wamen, serta jajaran,
Teman-teman Direksi BUMN dari RNI dan Bulog,
Bapak-Ibu yang saya hormati,**

PTPN dalam kaitan dengan pangan yang signifikan adalah komoditas gula, gula pasir, di mana PTPN mengambil porsi 35% dari produksi gula nasional. Sejak tahun 2021, PTPN mengkonsolidasi 36 pabrik gula menjadi satu entitas, namanya PT Sugar Company atau SGN, Sinergi Gula Nusantara, sejak itu maka kami melakukan pembenahan-pembenahan dan 3 tahun terakhir menunjukkan perbaikan tata kelola sehingga paling tidak, petani memperoleh harga yang wajar. Dan tahun lalu bersamaan dengan Elnino, di mana terjadi penurunan produksi gula sampai 100.000 ton, dari 2,4 atau 2,3, itu petani terus terang kami mengapresiasi keputusan pemerintah menetapkan harga acuan gula yang cukup memberikan petani mendapatkan apa namanya, manfaat yang luar biasa sehingga petani harapannya ke depan akan mampu memperbaiki tebunya.

Bapak, Ibu yang saya hormati,

Berdasarkan data yang saya kutip dari seminar gula, dinyatakan bahwa posisi stok gula nasional, mohon maaf, Pak, kalau datanya salah, ini saya kutip dari data Jurnal Gula edisi bulan Februari, posisi stok akhir tahun di 740.000 ton. Kalau kita mengacu data perjalanan 5 tahun terakhir, di mana konsumsi gula per, per tahun itu sekitar 3 juta, artinya tiap bulan sekitar 250.000 ton. Jadi stok akhir tahun ini hanya cukup untuk 3 bulan. Harapan kami tentu 3 bulan itu merupakan stok minimal agar tidak ada gejolak harga di pasar.

Khusus untuk PTPN, halaman berikutnya, PTPN ini saat ini kami memiliki stok 166.000 ton, di mana stok 166.000 ton itu sebagian besar sudah dimiliki oleh pedagang tapi belum dikeluarkan di gudang kami. Artinya ketika kita bicara kebutuhan hari raya, paling tidak dari PTPN, baik milik sendiri dan milik pedagang itu ada 166.000 ton, kemudian gula yang akan segera keluar dari pelabuhan sekitar 25.000 ton. Artinya ini sudah agak ngeri-ngeri sedap, Pak, apa, ketersediaan gula di pasaran.

Saat ini kalau tadi disampaikan oleh Pak Dirut RNI, harga di retail sudah 16.500, memang ada kecenderungan, Pak, kalau kami tender, kami biasanya menjual tender itu ada meningkat, Pak, sekarang sudah 15.000, artinya kalau ini tidak segera ditutup maka akan terjadi kenaikan harga.

Perlu kami sampaikan, Pak, bahwa sebaran areal tebu kami dari mulai Sumatera Utara sampai Sulawesi Selatan. Sementara kalau dilihat apa namanya, jadwal giling, itu yang paling besar itu di Jawa Timur ya sentra produksinya, itu bulan Mei, kemudian nanti meningkat sampai Juni, Juli, Agustus, setelah itu turun. Artinya, dari sisi PTPN, sampai dengan bulan Mei perlu diwaspadai. Tentu ini kebijakan pemerintah untuk mengatasi jangan sampai gula di pasaran berkurang dan harga akan melonjak.

Mungkin itu tambahan dari kami, terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

Setelah paparan dari Pak Menteri, jajaran Dirut BUMN, hari ini kita tahu gambarannya. Kenapa kita mengundang Pak Menteri dan jajaran BUMN? Mengacu pada Pasal 26, 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024, 2014 tentang Perdagangan, "Pengendalian barang pokok dan stabilisasi harga menjadi kewajiban pemerintah". Pasal 26, dalam kondisi...

Pasal 26 ayat (1), Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting".

ayat (2), Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga dan di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen. Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri dalam hal ini Menteri Perdagangan menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.

Demikian kawan-kawan sekalian, yang ingin menyampaikan pendalaman suasana rapat hari ini juga tidak lepas dari suasana kebatinan rakyat yang tentunya merasakan langsung kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Kita kemarin kampanye, kita sendiri banyak melakukan bansos, baik pilpres maupun pileg, setelahnya yang tertinggal sekarang adalah kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Semua pada nelpon, bertemu teman-teman, yang menang juga rasanya enggak enak, apalagi yang enggak jadi.

Untuk itu kami berharap rapat ini ada kesenjangan akses terhadap kenaikan bahan kebutuhan pokok, akses untuk stabilisasi, akses untuk kesediaan, maka saya berharap, kawan-kawan bisa menyampaikan apa yang paling bijak untuk rapat hari ini, supaya ketersediaan jangka pendek maupun panjang bisa kita atasi bersama.

Sudah ada daftar penanya, dari sebelah kanan, Pak Subardi, Pak Amin, Pak Mufti Anam, Mbak Rieke Dyah Pitaloka, I Nyoman Parta. Sebelah kiri, Pak Harris Turino, Mbak Evita Nursanty, Pak Muslim, Pak Khilmi, Pak Husni, Pak Herman Khaeron, kami berharap semua tertib 2 menitan saja, kalau ada yang sudah di sampaikan, untuk tidak diulang.

Selanjutnya saya beri kesempatan ke sebelah kanan, Pak Subardi, Eyang Bardi, oh ngga ada, ke sebelah kiri, Pak Harris Turino.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VI,

**Yang terhormat Pak Menteri Perdagangan beserta Wakil Menteri Perdagangan,
Direktur RNI,
Direktur BULOG, dan
Direktur PTPN,**

Saya akan mulai dari PTPN, Pak, dan mohon izin saya minta waktu sedikit. Yang pertama, selamat PTPN sudah punya tiga *subholding*, Palm.Co dan *supporting.co*, ini tambahan untuk melengkapi Sugar.Co yang sudah ada sejak 2021. Nah, tentu harapannya adalah PTPN bisa mewujudkan visi dan misinya. Saya juga mengapresiasi, Pak, kinerja keuangan Bapak di dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari sisi profitabilitasnya. Tahun 2022 mencatat laba bersih konsolidasi sebesar 6 triliun. Angka ini angka yang cukup besar, tumbuh 29,7% dari sebelumnya hanya di 4,64 triliun. Sementara kita ingat, 2020 PTPN masih membukukan kerugian. Prognosa 2023 seperti apa, Pak? belum ada datanya. Tetapi harapannya adalah walaupun harga CPO sudah turun, harapannya adalah kinerjanya tetap membaik.

Nah, mengenai paparan Bapak, tadi dikatakan bahwa 2027 produksi minyak goreng akan meningkat empat kali lipat dari 460.000 ton di 2021, menjadi 1,8 juta ton di 2027, berarti meningkat 4 kali lipat, berarti dibutuhkan sawit yang juga meningkat empat kali lipat. Angka ini sangat signifikan, mohon dielaborasi, Pak, bagaimana cara mencapainya? Apakah Bapak akan melakukan penambahan lahan, apakah Bapak akan akuisisi lahan baru, apakah akan *re-planting* atau langkah-langkah lainnya? Karena kita tahu, TPS perlu waktu 6 sampai 7 tahun, berarti paling tidak, ini sudah dilakukan 4 tahun, 5 tahun ke belakang, agar angka ini menjadi realistis.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Harris, rapat hari ini lebih pada soal kesediaan dan stabilisasi harga.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Iya, oke, terima kasih.

Kemudian kalau mengenai gula, Pak, Palm.Co, ya, ini targetnya mulia sekali, Pak, ya, Bapak harapannya adalah mencapai swasembada 2028 dan swasembada industri 2030. Apakah ini realistis, Pak? Karena kita lihat bahwa sejak 1973 kita sudah impor gula, ya, ini mohon untuk diperhatikan. Juga mengenai pabrik gula yang akan direvitalisasi, saya melihat tidak ada nama PG Pangkah, Pak, ya, ini mohon diperhatikan, Pak, karena beberapa kali di rapat sebelumnya, Bapak berjanji bahwa PG Pangkah akan direvitalisasi. Faktanya adalah mesinnya diambil, bahkan karyawannya dipaksa mutasi, yang tidak mau mutasi dipaksa untuk mengundurkan diri. Saya akan memperjuangkan hal ini, Pak, karena ini menjadi kebanggaan dari Dapil saya.

Untuk ID Food, Pak. Kita tahu Q1 harganya meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, gula konsumsi naik 20%, minyak curah 3%, daging ayam

ras 7-11%, telur 2 sampai 10% dan beras kita tahu kenaikannya luar biasa. Nah, apakah gerakan pasar murah di 100 titik yang Bapak laksanakan akan yakin cukup berpengaruh untuk penurunan harga, paling tidak untuk stabilisasi harga?

Kemudian untuk penugasan gula kristal putih, bawang putih dan daging sapi, itu bagaimana konsep pendanaannya? Apakah RNI mendanai lebih dahulu kemudian klaim ke pemerintah? Kalau ini dilakukan apakah tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan? Dan apakah gerakan pasar murah ini tidak bisa dikoordinasikan dengan kami yang ada di Komisi VI?

Untuk BULOG, ini ada data yang bertentangan dengan data yang disampaikan oleh rekan-rekan Bapak, karena Bapak *ngomong* surveinya bahwa harga beras sudah turun, ini pada tanggal berapa? Karena faktanya di lapangan harga beras masih tinggi dan bahkan Menteri Perdagangan yang duduk di samping kanan Bapak mengatakan data per 8 Maret juga masih terjadi kenaikan, sehingga yang benar seperti apa, Pak?

Untuk Pak Menteri Perdagangan, kita lihat, Pak, dalam grafik inflasi 5 tahun terakhir, Pak, bisa di dilihat bahwa menjelang Lebaran memang terjadi lonjakan inflasi. Ada periode-periode tidak terjadi inflasi secara drastis. Tahun lalu di ruangan ini, Pak, saya duduk di sebelah sana, saya mengapresiasi Mendag, karena praktis untuk tahun lalu tidak terjadi lonjakan inflasi menjelang Ramadhan. Nah, tetapi kita tahu untuk tahun ini suasananya berbeda, maka apa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan agar mampu meredam lonjakan harga yang sangat terasa ini?

Kemudian mohon klarifikasi juga, Pak, tadi pernyataan Bapak mengatakan bahwa kenaikan harga beras melulu karena Elnino, kalau memang ini benar, buktinya banyak negara lain yang masih punya kemampuan untuk ekspor, berarti pernyataan bahwa ini melulu karena Elnino bisa dipertanyakan. Kita juga harus akui bahwa bansos yang dilakukan besar-besaran di dalam waktu menjelang pemilu, ini juga menurunkan kemampuan pemerintah untuk melakukan operasi pasar ketika terjadi kenaikan harga.

Data dari Bapanas menunjukkan bahwa posisi stok di awal Januari adalah 7,04 juta ton, sehingga sebenarnya dengan tingkat kebutuhan kira-kira sekitar 2,5 sampai 3 juta ton untuk Januari dan Februari, sehingga sebenarnya pada awal tahun tidak dibutuhkan impor dalam jumlah besar, mohon konfirmasinya dan klarifikasinya mengenai hal ini.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

Sebelah kanan, Pak Subardi, belum ada? Pak Amin.

F-PKS (AMIN Ak, M.M.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri Perdagangan,
Pak Wamen, Wamendag,
Direktur RNI,
Pak Sekjen juga, Sekjen Mendag,**

Satu bangsa, satu tanah air sama saya.

**Dirut RNI, kemudian
Pak Dirut BULOG, sama
Pak Dirut PTPN III, dan
Semua jajaran yang saya hormati,**

Pertama, saya bicara produknya ya, soal beras, Pak, ini *kan* datanya memang kita enggak punya acuan yang, yang, yang valid ya, enggak punya *single data*, malah yang sering di media muncul itu apa, perbedaan pendapat antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Tapi oke lah kita sepakati bahwa sekarang musim tanam bergeser ada Elnino dan sebagainya sehingga memang terjadi kelangkaan, tapi *kan* impor kita juga sangat besar, Pak, jauh lebih besar dari impor-impor tahun-tahun sebelumnya, bahkan juga menjelang Pemilu 2019.

Saya memang lihat cermati *gitu* ya, setiap menjelang pemilu itu impor beras *tuh* tinggi, Pak, tapi yang sekarang ini yang tertinggi *gitu loh*. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah ketika sudah impor tinggi walaupun tadi oke lah ada musim tanam bergeser dan sebagainya, itu timbul kelangkaan dan juga dengan harganya juga sangat mahal. Ini, ini *real*, Pak, ya *real*, karena kita juga turun ke lapangan dan tentu ini menjadi pertanyaan buat kita.

Apa namanya, yang pertama ya memang ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak, Pak, mungkin mohon dijawab. Mestinya kita, Pak, memiliki manajemen bansos yang bagus ya, perencanaan yang bagus *gitu* ya, siapa jumlah berapa terus datanya valid, jangan sampai juga seperti kemarin, ada bansos tapi keluhan Kemensosnya enggak dilibatkan, dan itu kan juga ramai di media *gitu loh*. Ini berapa *sih* sesungguhnya yang digunakan untuk itu *gitu* ya, berapa yang diimpor, berapa yang untuk memenuhi kebutuhan rutin, berapa yang digunakan untuk Bansos dan sebagainya, sehingga kita enggak jadi bertanya-tanya, ini pemerintah punya kendali enggak *sih* terhadap produk-produk yang terkait dengan kebutuhan pokok, ya? Seharusnya kan memang pemerintah memiliki kendali.

Sementara data yang ada ya, kalau enggak, kalau enggak salah, Pak, pemerintah ada mampu menyerap gabah produksi petani itu 20% berbanding

dengan swasta yang 80%, ya otomatis ketika dengan kondisi seperti ini, kita enggak punya kendali *gitu* ya, tata niaga lebih dikelola, lebih dipegang oleh swasta. Mungkin stoknya itu ada, barangnya ada, tapi di mana, siapa yang menguasai *gitu loh*, barang langka ya harga mahal, tapi juga tidak dinikmati oleh petani kita. Jadi mestinya ini, ya ini Bulog atau siapa, saya melihat pemerintah itu harus mampu menyerap produksi gabah petani sebanyak mungkin ya, jangan seperempatnya yang diserap oleh swasta, sehingga kita menguasai tata kelolanya, tata niaganya, produksinya, jalur distribusinya, kita bisa mengendalikan itu, itu yang, yang pertama.

Kemudian yang, yang kedua, soal gula, ini saya juga kasih apresiasi, Pak. Tapi dari sisi ini sudah sering saya sampaikan, tapi dari sisi PTPN-nya sebagai BUMN, memang berkali-kali saya enggak bosan-bosannya kepada pemerintah, kepada Menteri BUMN, juga kepada Kementerian Perdagangan sekarang hadir, Pak. Seharusnya untuk impor gula itu, impor gula rafinasi itu, BUMN itu harus benar-benar dilibatkan dan dikasih jatah, ya 10% atau 20%. Masalah mampu enggak mampu itu *kan* soal bagaimana keberpihakan kita, semuanya bisa dipersiapkan *gitu* ya, infrastrukturnya, sehingga apa namanya, itu menjadi bagian dari keuntungan BUMN. Yang terjadi, sering selama ini kesiapan PTPN ini untuk membeli gula petani ya tidak, tidak, kadang-kadang tidak mampu bersaing dengan swasta. Nah, itu juga masalah tersendiri karena swasta *udah* banyak untungnya dari impor gula rafinasi itu. Itu memang ini lebih terkait kepada tadi PTPN sebagai BUMN yang mestinya juga meraih keuntungan dan ujung-ujungnya juga nanti bisa menjadi punya kendali lebih besar terhadap bahan kebutuhan pokok ini dibanding dengan swasta.

Kemudian yang terakhir, sisipan, Pak Pimpinan. Mohon maaf kepada khusus Pak Mendag ini, karena ini ramai, saya juga sering ditanya media, Pak, masalah *Tiktok shop* ini loh, Pak. Ini sampai kapan kebijakan tentang *Tiktok shop*. Saya yakin Bapak juga mengikuti perkembangan, apalagi Pak Menkop UKM juga sangat mengkritisi masalah ini. Kapan ini benar-benar akan ada pemisahan antara *Tiktok shop* ya dengan *Tiktok* ya, antara apa namanya, *social commerce* dan jangan sampai ini media sosial dijadikan sebagai saran untuk dagang, kalau mau dagang ya harus lewat *e-commerce*, ya. Karena ini kaitannya dengan soal apa namanya, keberpihakan kita kepada para UMKM produsen. Ya memang ke *social commerce* buat dagang banyak juga yang *ngambil* untung dari sana khususnya para *influencer gitu* ya, tapi ini keberpihakan kita kepada para UMKM yang produsen, Pak, ya.

Kemudian yang kedua juga soal perlindungan data. Saya kira ini sangat penting, saya enggak akan panjang-panjang, tapi saya yakin Bapak semua sudah tahu masalah ini, sekarang tinggal bagaimana pemerintah punya kebijakan yang ini kebijakan itu akan menguntungkan rakyat kita secara umum. Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Mbak Evita Nursanty.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak-bapak yang saya hormati,

Terima kasih atas paparan yang diberikan, namun saya melihat, maaf, dari Bapak Menteri, Bapak-bapak Dirut, dari apa yang disampaikan tadi, saya melihat tidak menggambarkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi saat ini. Bapak-bapak hanya memberi argumentasi pembelaan diri, "Kita *udah* lakukan ini loh, lakukan pasar murah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini". Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, Bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita, impor kita, beras kita, begitu tinggi, impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini, impor tertinggi kita untuk beras. Impor tinggi sudah, impornya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya impor itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka, berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari Bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi Bapak-bapak pada hari ini.

Sekarang salah siapa, salah petani? salah produsen? salah pemerintah? salah pedagang? siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendag tadi mengatakan, "salah Elnino", ya enggak. Kalau salah Elnino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain, kenapa carut-marut harga itu cuman ada di negara kita *gitu*, ya *kan*. Ini juga, saya makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran, hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya, dengan cari pasar murah, cari ini, cari ini, tapi permasalahan dari mana datangnya api itu, tidak pernah kita cari, ya akan berulang-ulang terus, Pak. Apa *nih* yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi?

Nah, sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang, Dirut Pupuk, baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa, gas yang juga akan naik. Nah, ini *kan* jadi hal-hal yang *announcement-announcement* yang meresahkan di kalangan petani kita, justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan.

Nah, ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya, bersama dengan *stakeholder* terkait, bagaimana ke depan ini, jadi jangan presiden kita

teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Impor beras tadi disampaikan Pak Mendag, 3,5 juta ton, saya juga ingin tahu, ke mana *sih* distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Okelah tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke, tapi kita pengin jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini, kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris, Pak, ngelihat di media-media sosial, rakyat kita antri begitu panjang, Pak, untuk beras, antri beras murah, Pak, harganya juga enggak murah-murah amat.

Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut apa namanya, RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa *sih* harga murah yang Bapak sebut tadi, enggak murah-murah amat juga yang disampaikan *gitu*, benar kan, Pak, enggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri, berarti apa, Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini, justru Bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, Bapak-bapak mau melakukan apa untuk permasalahan yang ada. Enggak cukup hanya buat pasar murah, enggak cukup BULOG hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan, harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh Bapak-bapak, enggak masing-masing jalan sendiri-sendiri, sebagaimana yang Bapak-bapak sampaikan tadi.

Saya rasa demikian, Bapak Pimpinan, terima kasih.

Oh, satu lagi, Pak, saya minta Perdagangan dan Bapak-bapak juga *ngawasi*, oplosan, Pak. Saya baca *nih* ada pengawasan apa namanya, yang oplos-mengoplos ini, dengan beras yang susah ini, Perdagangan *nih*, tolong diawasi *nih*. Ada kejadian itu Polres menangkap oplos-mengoplos beras BULOG, nah, ini jangan sampai ini terjadi lagi di tempat-tempat lain, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

Galak banget, Bu.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Persiapan oposisi, kayaknya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Setelah November. Tapi itu adalah suasana kebatinan rakyat supaya nyambung dalam rapat ini. Kami persilakan sisi kanan, Pak Subardi, belum ada, sudah keluar? Penanya berikutnya, Pak Mufti Anam.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama tentu kami sampaikan, Marhaban Ya Ramadan, Pak Menteri dan seluruh jajarannya, teman-teman semua.

**Pak Mendag, Pak Zulkifli Hasan,
Pak Wamen,
Pak Dirut ID Food,
Pak Dirut BULOG, dan
Seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini,**

Pertama, tentu kami senang mendengar pemaparan dari Pak Menteri tadi, menurut kami, dalam pandangan kami cukup komprehensif. Kegagalan kami selama berbulan-bulan ini, Pak Menteri, jujur selama pemilu memang banyak ketemu rakyat sehingga kita semakin dekat terhadap apa namanya apa yang dirasakan oleh rakyat selama ini, tapi ternyata penjelasan Pak Menteri tadi cukup buat kami cukup melegakan. Dan juga ternyata kita lihat, kalau *kan* kadang medsos tidak mencerminkan apa yang dilakukan Pak Menteri, tapi ternyata dari yang dipaparkan tadi, Pak Menteri sudah mengupayakan banyak hal yang menurut kami, kami perlu apresiasi itu, karena sekali lagi bahwa kami di Komisi VI ini juga belum tentu bisa seperti Pak Menteri *kan*, begitu ya.

Kemudian, Pak Menteri, yang kedua, tentu kami sedih, kami kecewa, kami malu kepada rakyat, Pak Menteri, kalau lihat di pasar-pasar begitu, bahkan di kampung-kampung, bahkan bukan hanya kelas rakyat, kelas orang kelas menengah saja sekarang mengeluh dengan tingginya harga beras, begitu. Jadi kalau kita bilang bahwa swasembada yang didengungkan atau dikampanyekan oleh Pak Jokowi sejak periode pertama sampai hari ini, tidak hanya tidak tercapai tapi justru hari ini apa namanya, ini menjadi rekor terbesar harga beras tertinggi sepanjang sejarah. Kalau kita lihat, bahkan kita lihat dari berbagai presiden yang ada, sampai hari ini adalah rekor harga besar, harga beras tertinggi, 35% dari harga HET yang ditetapkan, ini sungguh sangat menyedihkan. Kami sepakat atas yang disampaikan kawan kami tadi, Mbak Evita, Pak Harris Turino, bahwa ini perlu segera diatasi, dicarikan solusi agar penderitaan yang dialami oleh rakyat kami ini bisa segera teratasi dengan baik, Pak Menteri.

Yang kedua, salah satu kami, yang kami cermati di lapangan adalah kenapa harga beras meningkat ini? Karena secara psikologis mereka ini *panic buying*. Kenapa *panic buying*? Karena mereka merasa bahwa sekarang ada kelangkaan beras, padahal nyatanya seperti dipaparkan oleh Pak Menteri tadi oleh kawan-kawan dari ID Food dan juga BULOG, ternyata beras sebenarnya banyak, apalagi di BULOG begitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat hari ini, Pak Menteri, di retail modern itu beras tidak ada, Pak Menteri. Kami setuju dengan disampaikan Pak Menteri tadi bahwa masyarakat kita ini tidak mau makan beras BULOG, mereka maunya makan makanan bermerek tadi itu, nah, yang itu adanya di retail-retail modern. Nah, sekarang di retail modern itu, barang itu enggak ada, Pak Menteri. Nah, yang kami ingin tanyakan kepada Pak Menteri, apa yang akan dilakukan atau sudah dilakukan oleh

Kemendag untuk mengatasi agar di retail modern ini agar segera tersedia, yang kemudian secara psikologis rakyat kita tidak lagi merasa bahwa beras itu tidak ada, yang kemudian mereka bisa, kemudian bisa membelinya dengan harga yang terjangkau.

Kemudian yang selanjutnya, Pak Menteri, tadi kawan kami menyampaikan soal operasi pasar. Kami ini merasakan kalau katanya operasi pasar enggak ada gunanya, enggak juga. Kami lihat di lapangan di tempat kami, operasi pasar cukup membuat para mafia beras itu mereka berhitung, Pak Menteri, kami mengapresiasi atas hal itu. Cuman memang ada yang perlu sedikit diperbaiki yaitu soal ternyata di proses antrian operasi pasar tadi banyak sekali orang bayarannya dari pedagang beras, Pak Menteri. Nah, ini yang kemudian perlu ada *improvement*, ada inovasi dari Kementerian Perdagangan agar ke depan operasi pasar ini bisa lebih tepat sasaran, Pak Menteri.

Kemudian selanjutnya soal DMO yang disampaikan Pak Menteri tadi bahwa pada bulan Februari 2024 ini baru 41,2%, Pak Menteri. Nah, kami ingin tanya kepada Pak Menteri, bagi kawan-kawan apa namanya, pengusaha yang tidak bisa menjalankan DMO itu apa *sih*, apa *punishment* yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan? Dan apakah ada contoh, nanti bisa disebutkan oleh Pak Menteri, perusahaan yang tidak memenuhi DMO, *punishment* apa yang diberikan atau misalnya izinnya dicabut, itu sudah ada belum *sih* begitu, agar mereka tidak main-main lagi kepada Kementerian Perdagangan dan kepada pemerintah kita, agar kemudian minyak goreng ini bisa stabil di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian, ini hanya sekedar mengingatkan bahwa harga telur hari ini sudah 33.000 di pasaran, Pak Menteri. Kami tidak mau bahwa telur ini yang apa, seperti bulan Mei tahun 2023 itu sempat di angka 40.000, tapi saya *kok* punya keyakinan *Inshaallah* di tangan Pak Menteri ini bisa segera turun seperti yang sudah terjadi.

Nah, kemudian untuk ID Food, ini untuk ID Food, Pak. Bulan Desember, Pak Dirut, bulan Desember yang lalu, Pak, beras itu masih 55.000 di pasar. Kami saat itu mendengar El Nino, mendengar bahwa ada kelangkaan beras per 55.000 5 kilo, 55.000, bulan Desember, sehingga kami saat itu ada kegalauan di diri kami, kami tidak bisa memberikan sesuatu kepada rakyat maka kami, banyak kawan-kawan kami di Komisi VI melakukan bansos, pakai duitnya sendiri tentunya, membelinya di RNI, karena kami merasa bisa, bisa dapat lebih cepat dan berasnya bisa kualitas bisa lebih bagus. Nyatanya di RNI harganya saat itu 80.000, Pak. Kami sedih, karena apa? RNI harusnya jadi stabilisator, harusnya jadi contoh buat rakyat, tapi ternyata akhirnya pedagang-pedagang di pasar, *ngerti* harga di RNI *ngawur*, mereka tidak takut-takut lagi menaikkan harganya. Dan Bapak tahu hari ini, Pak, kami kemarin, serius, Pak, ini, Pak, Bapak harus perhatikan hal ini.

Kami kemarin, Pak, ini mau Ramadan, kami pasti ditunggu oleh rakyat kami, "Pak Mufti, teman-teman yang lain berbagi enggak beras pada kita, ya kan, kita sedang langka *nih* di pasaran". *Sampean* tahu, Pak? Kita tanya ke

RNI, berapa harganya? Seratus ribu, Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang, Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami, beras terbaik *aja* 70.000, Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat menurunkan harga tapi Bapak tidak *ngasih* contoh yang baik, tidak ada gunanya Pak semua ini, Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI, Pak.

Minyak goreng, Pak Mendag tadi sudah sampaikan harganya berapa, Bapak jual harga berapa, Pak? Satu liter 25.000, gila Bapak ini, Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini, Pak, perbaiki, Pak. Kami ini beli kepada mitra kerja kami, tujuannya apa? Pertama, karena beli kami banyak, yang kedua kami pengin memastikan bahwa kualitas beras dan minyak yang kami berikan kepada rakyat kami, kepada konstituen kami yang terbaik. Tapi bukan kemudian dijilat oleh Bapak. Yang kedua, ini bisa jadi contoh yang Presiden yang buruk buat rakyat kami, Pak.

Kemudian yang kedua untuk BULOG, Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000, Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial, Bapak punya *Tiktok* tidak, punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar, tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000,00. Apa gunanya BULOG, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak, tidak ada bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini, sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak?

Itu saja, Pak, yang ingin kami tanyakan, Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya adalah integritas kita, Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

Selanjutnya, Pak Muslim.

F-P.DEMOKRAT (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan, dan Teman-teman Anggota Komisi VI,
Pak Menteri,
Pak Wamen, kemudian
Pak Dirut RNI, Pak Frans, kemudian**

**Pak Ghani, PTPN III, kemudian juga
Pak Bayu Krishna Murti, BULOG,**

Pertama, tentu terima kasih Pak Zulhas, saya melihat di halaman 5 itu, upaya mitigasi yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah menghadapi periode Ramadan dan Idul Fitri. Saya ingat kembali *nih*, Pak, Pak Menteri, waktu ketika naiknya harga minyak goreng, Pak Zulhas. Saya pikir Pak Zulhas waktu itu sudah banyak melakukan langkah-langkah dengan hadirnya Minyak Kita. Tentu sebenarnya saya melihat dengan pola yang dilakukan Pak Menteri, saya pikir itu satu langkah yang harusnya dilakukan kepada komoditi yang lain, Pak Zulhas, misalnya beras, daging, dan lain-lain. Artinya apa? Ketika itu begitu harga minyak goreng begitu, begitu apa, begitu tinggi, Pak Menteri saya lihat begitu cepat melaksanakan dan cepat turun, Pak. Tentu kita berharap ini bahwa apa yang Pak Menteri, lakukan kita berharap juga diikuti dengan yang lain, Pak Menteri, misal seperti beras, kemudian gula, dan lain-lain, artinya pola-pola ini, saya yakin ini pasti bisa dilakukan, asal pemerintah ini serius betul melaksanakan hal ini.

Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, persoalan ini kan bukan hanya persoalan yang pertama dan ini terjadi secara berkesinambungan terus, tahun demi tahun, apalagi berkaitan dengan harga beras. Tentu saya berharap, Pak Menteri khususnya, berkaitan dengan persoalan beras maupun yang lain-lain mudah-mudahan bisa dilaksanakan solusi.

Yang kedua, berkaitan importasi daripada beras kemudian daging dan lain-lain, ini tentu kita lihat pada posisi hari ini, ini begitu besar, tentu yang sangat dirugikan adalah petani, Pak Menteri. Hari ini apa pun kita cerita bahwa petani ini sering sekali terjadi ketika impor masuk di saat apa namanya, hasil panen berlimpah. Artinya apa? Ini juga tentu kita harapkan Pak Menteri mengambil langkah-langkah konkret, jangan sampai ketika harga tinggi, yang diuntungkan ini para mafia, mafia beras maupun mafia pangan. Artinya apa? Di satu sisi, petani menjerit. Saya yakin kondisi seperti ini harusnya memang ini harus didudukkan bersama sehingga langkah-langkah bisa. Saya yakin pas bisa, Pak Menteri, apalagi khususnya di PTPN III, Pak Ghani ya, kita melihat bahwa berkaitan dengan produk dari gula ini yang telah dilakukan oleh PTPN III, saya pikir ini sudah memberikan solusi. Namun hari ini, lagi-lagi kita lihat bahwa harga gula ini sudah mencapai di atas 17.000, kemarin Pak Frans, terima kasih, saya ada beli beras apa beli gula juga ya di RNI di harga, memang ada perbedaan, tapi namun demikian harus ada langkah-langkah yang dilakukan, khususnya Pak Menteri beserta dengan jajaran RNI, BULOG maupun PTPN.

Saya yakin kalau keempat yang hadir di depan ini, Pak, saya yakin pasti ada solusi, Pak. Kenapa? Karena ini Bapak punya kewenangan penuh, jangan sampai yang mengatur Bapak-bapak ini pihak swasta. Saya yakin waktu dilakukan Pak Zulhas, saya sepakat, Pak. Bapak bisa mengendalikan ketika itu dalam konteks minyak, saya harapkan beras bis dilakukan hal yang sama, apalagi harga beras ini terus-terang, Pak, sangat menderita, Pak, sangat berat hari ini, apalagi lagi di, saya melihat kemarin juga di berapa *supermarket* itu enggak turun, Pak, malah naik. Ini beberapa hal mungkin

yang ingin kita harapkan tentu dengan waktu yang sebentar lagi kita menuju perayaan hari raya Idul Fitri, kita harapkan ini harus segera langkah-langkah ini diambil, baik dari Kementerian Perdagangan, BULOG, RNI dan juga oleh PTPN III.

Saya pikir itu beberapa hal, Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Muslim.

Selanjutnya, Mbak Rieke Diah Pitaloka.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):

Ininya belum nyala soalnya, sebentar, sebentar, soalnya ini *ditanyain* terus sama *netizen* soal kebutuhan pokok, jadi saya harus bicara. Sudah pas, sudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang saya hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia,
Direktur Utama Perum BULOG dari Perhutani,
Kemudian ada Wakil Menteri Perdagangan,
Direktur Utama PT RNI,**

Terima kasih atas pemaparannya.

Sebelum ke isu itu, saya ingin, ini di luar rapat hari ini, tapi saya mohon bantuan Pimpinan dan Anggota, kalau boleh dijadwalkan khusus tentang Taspen, Pak, saya titip, karena sedang ramai ini, ada 345 triliun uang PNS yang harus kita selamatkan.

Berikutnya kembali ke laptop, persoalan kenaikan harga pangan ini saya kira tentu menjadi perhatian kita semua. Masalah pangan adalah masalah kedaulatan negara jadi tentu saja kita sepakat, konsep kita bukan hanya ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan, di mana bukan sekedar bagaimana pangan ada di pasar, tapi bagaimana hulu, tengah, hilir pangan itu benar-benar bisa memberikan kontribusi positif terutama untuk kehidupan masyarakat kita.

Tadi sudah disampaikan beberapa hal, tapi saya sepakat dengan teman-teman yang lain, kita cari solusi bersama. Pertama, tentu saja target

kita semua, saya harap sama, yaitu turunkan harga pangan terutama komoditas-komoditas strategis yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Penyumbang inflasi terbesar di awal 2024 itu tadi juga sudah disampaikan beras, ada cabai merah, ada telur ayam ras, tapi gula juga mengalami kenaikan sekarang, lalu kemudian, Pak, harga tomat juga naik ya, per kilo sampai 35.000, ini salah satu yang saya enggak tahu kenapa tomat naik mau Lebaran ya, apakah orang buka puasa karena butuh makan tomat *gitu*, tapi saya kira itu bukan jawabannya.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Sekali lagi, kami minta langkah-langkah konkret untuk penurunan harga 9 bahan pokok, harga pangan kita dan kemudian stabilitas pangan. Kami mengapresiasi langkah Menteri Perdagangan yang pernah ada metode untuk mengendalikan harga minyak goreng, Pak, mudah-mudahan ini bisa dilakukan untuk komoditas yang lain.

Namun demikian, dalam rapat berikutnya, tentu baiklah kita buka kepada publik, mana yang menjadi wewenang Kementerian Perdagangan di sektor pangan, mana yang bukan. Saat ini ada Badan Pangan Nasional ya, termasuk urusan *import*-nya tidak di Menteri Perdagangan, beberapa komoditas penting ya. Oleh karena itu, mungkin ke depan, Pak, di awal rapat disampaikan, mana yang menjadi wewenang Kementerian Perdagangan dan mana yang bukan.

Lalu kemudian tadi ada informasi yang, yang berbeda mengenai ketersediaan pangan khususnya beras. Kepada BULOG, Bapak, mohon diatur strategi dan mungkin nanti kalau BULOG harus ada menterinya, Bapak, karena menjadi penting juga BULOG ini, hutangnya cukup banyak, termasuk hutang kepada perbankan ya, yang harus menutup, harus membeli beras impor begitu, betul Bapak, betul ya Pak Dirut ya, Pak Dirut? Banyak sekali utang yang harus ditanggung. Kalau itu penugasan negara, seharusnya ada keringanan dari negara terhadap BULOG. Jangan kemudian BULOG dituntut untuk menutupi impor pangan, impor beras itu besar sekali, Pak. Boleh nanti dibuka juga berapa per bulan dan berapa per tahun, BULOG harus membayar hutang dari impor beras tersebut. Nah, kalau itu penugasan negara, saya kira harusnya tidak dibebankan kepada BULOG.

Nah, kemudian, Bapak, mohon solusinya, harga tadi disampaikan oleh Pak Mufti, saya sudah cek terutama di beberapa daerah di luar Jawa, akhirnya petani itu lebih memilih menjual hasil padinya kepada tengkulak, bukan kepada BULOG. Kenapa demikian? Karena harga beli BULOG itu rendah, maka kami mengusulkan adanya politik harga dari negara, subsidi harga dari negara, Bapak. Bukan subsidi pupuk apalagi pupuk organik, Pak. Subsidi harga itu lebih penting, kami tidak hanya menginginkan juga, ini pernah dibahas rasanya oleh Menteri Perdagangan, menentukan bukan hanya harga eceran terendah tapi juga harga eceran tertinggi, ini juga harus ditetapkan sehingga tidak terjadi fluktuasi harga yang mempengaruhi, bukan hanya daya-daya jual petani, tetapi juga daya beli pasar.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Sekali lagi, saya mengusulkan, ini juga untuk tadi, pangan.id, apa namanya, RNI, ID Food, Bapak, betul sekali harga-harga yang ditawarkan ini beberapa cukup mahal, Pak. Dan saya minta argumentasi penetapan harga dari ID Food itu, apa indikatornya? Lalu di sini disampaikan, menggelar, apa enggak bisa bareng-bareng *gitu* dengan Kementerian Perdagangan, dengan BULOG, dengan PTPN, dan sebagainya, kalau saya lihat, ini yang dijual juga bukan minyak yang tadi diproduksi, Minyak Kita misalnya, di sini dengan *brand* yang lain *gitu*.

Saya juga minta apa perhitungannya atau apa analisis dan kajiannya tentang titik-titik yang ditentukan untuk gerakan pangan murah. Dalam forum ini kami mendesak, libatkan kami, Pak, Komisi VI, untuk gerakan pasar murah, Pak Direktur Utama ya, mohon juga mendapat dukungan dari Pimpinan dan Anggota, untuk, ini bukan hanya urusan, pemilu sudah selesai, Pak, ya, tetapi kami masih punya tanggung jawab moral bahwa kami masih menjabat sampai akhir periode ini sehingga jangan jalan sendiri, Pak, dan kenapa ini titik-titiknya lokasinya, provinsinya, Bapak tentukan sendiri, apa pertimbangannya, begitu.

Yang terakhir, Pimpinan, mengenai data inflasi, koreksi jika salah, jika saya salah, Pak. Data pangan kita, data pertanian kita yang terintegrasi dengan data pangan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, bukan oleh Kementerian Perdagangan, bukan oleh Kementerian Pertanian, bukan oleh BULOG dan anggarannya mencapai 3 triliun ya, oleh BPS. Nah, di akhir rapat sebelum kita kampanye, saya minta informasi tentang data itu, Pak Menteri, apakah dapat atau tidak. Karena kalau kita lihat dan telusuri, inflasi pangan di tiap provinsi, pendataan dari BPS itu tidak *fair*, satu provinsi diambil *sampling* 3-4 kabupaten. Dan itu kemudian dijadikan ukuran inflasi pangan satu provinsi. Kalau, ini *kan* lagi musim PJ-PJ *nih*, Pak, kalau PJ gubernur atau PJ bupati/kepala daerah terindikasi, indikasi, saya enggak nuduh, kira-kira enggak setuju *gitu*, kemarin, mudah-mudahan setelah ini tidak terjadi. Lalu kemudian dicopotlah itu si PJ dengan alasan tidak mampu mengendalikan inflasi pangan, padahal inflasi pangan, ukurannya dalam satu provinsi, sekali lagi, diambil tidak lebih dari seperempat tingkat duanya, itu enggak *fair*.

Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami juga setuju adanya data yang terintegrasi, akurat, dan aktual, seperti tujuan dari sensus pertanian 2023 yang menelan anggaran 3 triliun, melebihi anggaran dari Menteri Perdagangan yang harus menggondong pasar desa dan seterusnya.

Terima kasih untuk dukungannya.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

Kami persilakan, Pak Khilmi.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Ketua Komisi VI yang lengkap, beserta
Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Menteri Perdagangan,
Wakil Menteri Perdagangan beserta jajaran,
Dirut PTPN III,
Dirut RNI beserta jajarannya,**

Jadi setelah saya duduk di Komisi VI ini hampir 10 tahun, kurang 8 bulan, permasalahan itu tetap *aja*, Pak, tiap pada menghadapi hari-hari besar keagamaan, intinya itu harga bahan pokok naik dan ini tidak pernah dibuat kajian oleh Kemendag. Apa yang menyebabkan barang-barang ini setiap momen-momen tertentu itu naik. Padahal tadi BULOG menyampaikan cadangan beras 1 juta, 1.093.000 ton, hampir mendekati cadangan beras nasional. Harusnya ini kan tidak boleh terjadi, ada kenaikan harga beras yang gila-gilaan, karena kita ini punya cadangan yang cukup.

Setelah saya lihat dari apa yang dilakukan melalui operasi pasar ini, Pak, ada kesalahan. Beras ada, seolah-olah beras langka. Ini harus dikaji benar *gitu loh*, Pak, beras ini ada, tapi sekarang ini kalau kita operasi pasar mengumpulkan orang yang besar, terus *ngambilnya* secara rebutan, *ngantri* sampai berjam-jam, ini *kan* di masyarakat yang tidak melakukan, melihat di TV, *wah*, beras ini langka. Nah, ini kesalahan-kesalahan kayak begini *nih* jangan sampai, apalagi ini mendekati tahun-tahun politik untuk pilgub, pilbup, jadi ini jangan sampai *gitu loh*. Masalahnya ke depan *Inshaallah* presiden kita ini *kan* Pak Prabowo Subianto ini, *udah* pasti menang, jadi kita tidak mau Indonesia Maju ini, barang-barang yang akan terjadi tiap ada hari besar, harga naik. Hak angket enggak perlu, ini kalau perlu ke Bawaslu lah, kalau protes, *udah* ada mekanismenya sendiri. Jadi ini masalah kestabilan harga ini, Pak, Pak Zul ini *kan* kemungkinan jadi Mendag lagi *nih*, masalahnya dia termasuk Indonesia Maju, enggak tahu kalau Menko, Menko Ekuin ya.

Jadi saya lihat, Pak, kemarin itu *tak* lihat di TV, orang sampai antri 1 kilo panjangnya, terus ada yang pingsan, itu *kan* nanti mengakibatkan seolah-olah beras ini enggak ada. Terus cara operasi pasar, yang saya lihat yang disampaikan RNI, ini semua manfaat untuk ke masyarakat agak kecil lah, *wong* dia titiknya kayak begitu. Harusnya, kalau melakukan operasi pasar itu ke titik-titik sentral di desa, apakah itu yang melakukan itu di balai desa atau di mana. Masalahnya itu kan sudah terukur, orang yang akan beli itu ya orang desa itu. Jangan sampai ini kita *ngumpulin* orang untuk alat politik, seolah-olah bupati itu memperjuangkan kepentingan masyarakat, padahal itu alat politiknya dia. Kita memperjuangkan beras murah, *wong* berasnya itu dari BULOG, harganya sudah ditentukan, *kan* begitu. Jadi BULOG ini juga melakukan pemasukan ke Indomaret, Indogrosir, Hypermart, sebetulnya

Bapak ini *kan* harus melakukan operasi pasar lewat Inkopas, Induk Koperasi Pasar, di situ adalah pusat induk koperasi yang ada di situ, Pak. Jadi kalau ada barang langka maka pedagang-pedagang itu *ngambil* di situ. Jadi ini *kan* salah *gitu loh*, langkahnya ini salah. Jangan sampai Bapak sudah diberi penugasan tapi salah langkah dalam memberi, melakukan keputusan untuk operasi pasar.

Terus masalah penugasan-penugasan ini, Pak, misalnya kayak BULOG tadi *kan* yang disampaikan ke RNI *kan*. Kedelai, jagung, beras, itu *kan* tugas utamanya pengadaannya *kan* ada di BULOG, jangan sampai ada perusahaan swasta juga diberi alokasi impor yang besar juga, Pak. Kalau itu dilakukan maka pengambilan barang yang ada di luar negeri itu akan rebutan, jadi harganya akan mahal *kan gitu*, seolah-olah butuhnya ini sama-sama orang Indonesia tapi pelakunya ini banyak. Jadi mana barang-barang yang dilindungi, dilindungi atau pengawasannya di dalam di Kementerian Perdagangan ini, difokuskanlah, supaya ke depan barang-barang ini tidak langka dan tidak dipermainkan oleh pemain-pemain besar di barang-barang seperti jagung, gula, kedelai, terigu, dan yang macam-macam itu.

Dan saya, masalah minyak goreng Kita ini, Pak, ini *kan* udah ada yang tembus di 16 ribu kita lihat di TV, ya belum kita *kan* belum pernah sidak ke pasar lagi apa itu betul atau enggak, padahal pemerintah *kan* sudah menetapkan bahwa Minyak Kita ini harga tertingginya 14.000. Dan ini mohon ditinjau, apakah benar di lapangan itu harganya kayak begitu? Jadi saya mohon Kementerian Perdagangan dan RNI, PTPN, BULOG ini memikirkan bagaimana barang-barang yang mau diimpor itu jadi satu harga, tidak rebutan di pangsa barang yang akan dibeli, itu dari saya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Selanjutnya, Pak I Nyoman Parta.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

**Pimpinan, beserta
seluruh Bapak-Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,
Pak Menteri,
Direktur Dirut RNI, dan juga
Dirut BULOG,**

Pertemuan ini sesungguhnya kita tunggu-tunggu sejak lama, syukur hari ini bisa kita ketemu.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan, ketika ada antrian yang panjang bahkan di beberapa tempat di Jawa Barat sampai ada yang pingsan karena mengantre beras murah, Menteri Perdagangan, Dirut BULOG, Dirut

RNI, Bapak prihatin tidak, Bapak prihatin tidak melihat situasi seperti itu? Kalau kami, Anggota Dewan yang melakukan fungsi pengawasan, sangat prihatin. Harusnya selaku eksekutor, selaku eksekutif, BUMN juga yang membidangi masalah pangan, BULOG dan RNI, harusnya prihatinnya berlipat-lipat. Karena kejadian ini, Pak Menteri, sudah dua kali ketika Bapak menjabat menteri ini, dalam masa jabatan Pak Menteri ini sudah dua kali terjadi situasi ini, memang sebelumnya tidak seekstrim ini, bahkan kita pernah kunjungan bersama ke pasar di Bogor, waktu juga sembako dan khususnya minyak goreng yang mengalami kenaikan yang sangat-sangat tinggi sekali.

Yang kedua, mungkin memang, Pimpinan, saatnya kita lakukan evaluasi tentang ketahanan pangan. Sesungguhnya yang dituju harusnya bukan ketahanan pangan dalam konteks kita melakukan tata kelola sembako dan khususnya tata kelola perberasan. Jadi ketahanan pangan, yang penting rakyatnya makan, yang penting kebutuhannya terpenuhi, persoalan datangnya dari mana, enggak penting. Kalau sudah merasa kurang, segera impor, jalan yang paling mudah. Lebih mudah daripada memperbaiki 30% irigasi pertanian yang rusak, lebih mudah dari daripada membantu pupuk petani. Jadi gampang banget dan lebih mudah para mafia pangan mendapatkan komisi, mendapatkan duit, mungkin juga kecipratan pada oknum-oknum pemerintah, jadi, itu satu.

Sesungguhnya yang dituju harusnya kedaulatan dan kemandirian pangan. Kita makan apa saja terpenuhi, tercukupi, tetapi merupakan hasil yang kita ambil, yang kita produksi, yang kita tanam, yang kita panen dari bumi pertiwi ini, yang katanya bumi yang sangat subur sekali. Sesungguhnya iklim, iklim yang diberikan oleh Tuhan terhadap republik ini luar biasa, kita memiliki sinar matahari yang cukup, kita juga memiliki curah hujan yang, yang cukup. Sesungguhnya kondisi itu sudah bisa diprediksi, karena memang Indonesia ada di belahan tropis dengan memiliki iklim tropis, jadi ada hujan yang cukup, ada sinar matahari yang cukup. Sehingga tidak bisa setiap kali ada kondisi seperti ini, seluruh pejabat terutama juga Pak Menteri, alasannya El Nino. Dan itu berulang-ulang. Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah, paling mudah banget, orang yang tidak-tidak tamat SD pun bisa itu, kalau sudah rusak, salahkan alam, kalau sudah tidak panen, salahkan banjir, gampang banget. Jadi lebih lanjut lagi, salahkan takdir, selesai sudah. Jadi enggak ada gunanya kita ini, enggak ada gunanya gagah-gagahan.

Yang ketiga, yang kedua, khusus untuk Dirut BULOG. Segera Bapak harus perbaiki, agar Bapak tidak membuat justifikasi dalam pertemuan kita seperti ini. Jadi urusan jabatan baru 3 bulan, urusan hal yang biasa saja. Perbaiki bahwa Bapak harus beli gabah petani. Jangan, jangan berkelit bahwa tidak bisa, aturannya melarang kami membeli melebihi aturan main, itu harus diubah. Sepanjang Bapak tidak serap hasil pertanian, sepanjang BULOG tidak menyerap gabah petani, maka situasi ketidakstabilan ini akan terus terjadi. Beras yang paling dibutuhkan, kita serahkan hampir 80% kepada pihak swasta, gabahnya. Lalu kita ingin tertib, lalu kita ingin stabil, enggak masuk akal. Tidak masuk akal, ketika petani menghasilkan diserahkan langsung kepada tengkulak dan lalu kita minta stabil, rumusnya datang dari

mana? Harusnya BULOG sebagai garda depan dalam persoalan menjaga stabilisasi pangan, BULOG yang harus membeli. Dan petani memang harus diberikan harga yang bagus sebagai penghasil kebutuhan strategis, petani memang mutlak harus diberikan harga bagus, jangankan 7.000, 9.000 pun layak, Pak.

Kita *kan* belum bersama, semuanya makan gandum *kan*, kita belum, belum bisa *kan* berganti makanan sepenuhnya kalau bukan dari beras. Persoalan konsumen sebagai konsumen kita membutuhkan harga yang bagus dan terjangkau, itu urusan pemerintah, urusan Pak Menteri Perdagangan. Jadi jangan petaninya diajak miskin. Sebagai penghasil beras, harusnya kita berterima kasih kepada petani, karena kita tidak akan bisa makan tanpa mereka memproduksi.

Berikan dia harga yang bagus, BULOG harus beli itu. Persoalan konsumen harus kita lindungi agar bisa menjangkau harga beras kita, harga sembako kita, itu tugas pemerintah. Jadi selama ini petani miskin bukan karena persoalan hama atau semata-mata persoalan alam, Elnino, tapi karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Jadi petani kita jadi miskin karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Hari ini ketika beras harganya mahal, kita ingin menurunkan harga gabah, konyol sekali. Gara-gara ingin beras murah, kita ingin turunkan harga gabah petani, itu tindakan yang konyol. Harusnya petani diberikan harga yang bagus, beras kepada konsumen diberikan harga yang terjangkau agar rakyat bisa membeli semuanya, itu tindakan yang *bener*. Itu, tolong dijaga dan *didengerin*, penting itu, semua dari Pak Menteri, Dirut BULOG, maupun RNI.

Pengalaman kecil saya ketika kemarin harga beras 17.000 sampai 19.000, saya menghubungi Dirut RNI, saya melakukan, minta tolong, itu pun hanya di dua lokasi dan satu lokasinya beras yang *dibawain* bukan beras yang kita sepakati, aneh banget. Jadi saya minta beras dengan harga tertentu, C4, lapangannya kami subsidi agar lebih murah 5.000 per kilo, kita subsidi agar lebih murah. Jadi kalau memfasilitasi DPR itu kadang DPR-nya juga ikut subsidi, Pak, bukan hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan jualan BULOG dan RNI. Kita subsidi dengan dana pribadi agar rakyat dapat lebih murah. Tetapi yang datang malah bukan beras yang kita sepakati. Lucunya, Pak Dirut *dilaporin* sama stafnya, "Beras ini lebih bagus". Untung saya sempat ambil, berasnya patah-patah, nasinya tidak bagus, jadi Bapak dibohongi oleh staf Bapak itu.

Yang kedua, kepada BULOG juga, saya sempat komunikasi dengan Pak Dirut. Kepala BULOG Bali itu susah sekali diajak bicara, apa enggak bisa digeser, dipindahkan dari Bali, agar saya lebih mudah berkomunikasi? Sempat *kan* saya *ngomong* seperti itu? Urusnya urusan rakyat. Saya tidak menelepon Kepala BULOG untuk minta proyek, tapi untuk bagaimana rakyat Bali terlayani kebutuhan berasnya, itu urusannya, bukan minta proyek, diajak komunikasi saja susah, kalau bisa digeser itu, Pak, dari Bali, agar tidak lama-lama berkonflik dengan saya. Iya, lebih bagus *gitu*.

Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan, yang paling penting untuk BULOG, beli gabah petani. Bapak harus, harus serius, yang membedakan Bapak dengan pimpinan BULOG-BULOG sebelum-sebelumnya. Kalau memang 9.000, beli 9.000, kalau lebih mahal lagi harga beras, harga gabah petani, beli lebih mahal lagi. Selanjutnya Bapak mau jual lebih murah, tanggung jawab pemerintah. Gratis sekalipun, Bapak kasih rakyat, saya berterima kasih, tetapi harga gabah petani jangan pernah *diturinin* karena dia sangat berjasa terhadap kita, itu yang paling penting cara berpikirnya, jangan dibalik-balik.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih.

Selanjutnya, Pak Husni.

F-P.GERINDRA (H. M. HUSNI, S.E., M.M.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya perpanjang waktu setengah jam.

(RAPAT: SETUJU)

F-P.GERINDRA (H. M. HUSNI, S.E., M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI, dan seluruh jajarannya,
Yang saya hormati Bapak Menteri Perdagangan,
Wakil Menteri Perdagangan,
Yang saya hormati Dirut dari RNI, kemudian dari
PTPN III, dan juga dari
BULOG,**

Sedikit ini Pak Menteri yang ingin saya tanyakan, ini ada anomali saya lihat di halaman 4, bahwa di situ dikatakan beras, daging ayam, telur, cabai itu naik, sedangkan tadi yang Bapak sampaikan bahwa dengan turunnya harga jagung, membuat harga telur itu turun. Namun karena kita pada hari ini adalah rapat tentang persediaan pangan, stok dan harga pangan, tentunya di sini yang ingin saya sampaikan, Pak Menteri, bahwa di sini tidak ada satu pun Pak Menteri mencantumkan, karena ini adalah bawang merah, daging sapi, bawang putih, tepung terigu, ini adalah komoditas-komoditas impor, ini sangat tergantung dengan perubahan-perubahan harga kurs. Tadi saya melihat waktu Januari itu rata-rata kurs kita 15.800, tentunya sekarang harus dia bisa lebih turun, karena kurs kita di antara Rp15.500,00 per US Dollar, itu, tapi di

paparan dari Pak Menteri ini, satu pun tidak ada dicantumkan terjadi perubahan-perubahan harga.

Apa yang disampaikan tadi oleh anu, Direktur BULOG, yang telah melakukan peninjauan di beberapa pasar, ini saya lihat Bapak meninjau ini ada namanya Pasar Palapa Pulau Brayan ya dan pasar MMTC di Deli Serdang, itu dapil saya *tuh*, Pak, dan juga turun di toko beras di Banda Aceh, itu tanah kelahiran saya *tuh*, Pak. Saya di sini ingin melihat ya melihat bahwa tentunya turunnya ini bukan karena turun *real* tapi adalah akibat daripada perubahan daripada kurs mata uang Rupiah ke US Dollar yang juga turun.

Kemudian juga ini saya melihat ya apa yang Bapak sampaikan, ada satu hal permasalahan di BULOG yang mungkin sampai hari ini enggak terselesaikan, Pak. Teman-teman saya, HKTI, mengatakan begini, Pak, di BULOG ini ada istilahnya beras mumet, mungkin Bapak lebih paham *tuh* beras *mumet* itu apa. Beras itu lepas ke pasar, ya, lepas ke pasar, karena tidak dimakan oleh para konsumen, sudah ada penampungnya dan balik lagi ke Bulog, ke BULOG, itu ya teman-teman saya mengatakan *tuh* beras *mumet*, Pak. Ternyata saya hari ini masuk ke Komisi VI, ada yang lebih *mumet* lagi rupanya, Pak. Tadi teman saya mengatakan harga gabah itu yang Bapak katakan Bapak beli 7.000, ternyata di pasaran itu cuma 5.000an, begitu *kan*, dan di dapil saya juga berlaku seperti itu, Pak. Saya takut ini, Pak, di BULOG ini mungkin ada calo *mumet* kali, Pak, ya. Tolong hal-hal seperti ini jangan sampai dulu waktu kita SD, ada istilah itu tikus mati di lumbung padi. Tapi jangan sampai petani kita dengan harga beras yang mahal tapi mereka tidak menikmati apa pun, ya. Jadi ini hal-hal yang, yang mungkin ya hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya.

Kemudian saya senang, dari ID apa ini tadi, apa, ID Food ya. ID Food melakukan gerakan pangan murah. Dua halaman yang Bapak lakukan *nih*, gerakan pangan murah, penjualnya ada, pembelinya enggak ada *nih*, Pak. Apakah yang teman-teman saya sampaikan tadi, ini murah betulan apa murah-murahan *gitu*, Pak, ya? Apakah ini yang dikatakan, yang Bapak katakan gerakan pangan murah ini lebih murah daripada harga yang ada di pasaran? Karena tentunya konsumen itulah yang akan diharapkan.

Ini sedikit lagi, Pak Menteri Perdagangan, saya, profesi saya memang ada keahlian saya meng apa itu, main mata uang, mata uang asing, *Inshaallah* ya, apa, April ini, silakan Bapak catat, *Inshaallah* nanti kita ketemu lagi, kurs mata uang itu, USD ke Rupiah, akan lebih turun lagi.

Itu saja, Pak Ketua, yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Singgih, silakan.

F-PG (H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Selamat siang Pak Menteri,
Pak Mendag,
Pak Wamen, dan
Dirut-dirut dari ID Food dan BULOG,**

Saya akan singkat saja, Pak, yang pertama masalah jagung, Pak. Jadi memang sepanjang sejarah, Pak, jagung itu tahun ini yang tertinggi, Pak, hampir 9.000, Pak. Nah, kemarin kita bersyukur, beruntung, ada masuk jagung sekitar 250.000 ya, Pak, ya, itu membantu peternak-peternak kemarin sehingga harga jagung tidak lebih tinggi lagi, Pak.

Berkaitan dengan impor tadi, Pak, jadi memang jagung itu selalu dalam setahun itu ada naik turunnya, Pak, waktu panen raya memang dia akan di harga 5.000an sekarang, memang sesuai dengan biaya produksinya, HP-nya, Hp-nya mungkin, tapi di bulan-bulan tertentu akan mahal sekali, Pak. Sedangkan kebutuhan jagung untuk pakan ayam, itu stabil, Pak, dalam setahun. Jadi setahun stabil, kita setahun itu kebutuhan sekitar 9 jutaan ton per tahun untuk pakan ayam konsumsi. Harapan kita nanti ke depan, Pak, untuk pengaturan waktu impor saja, Pak. Jadi impor jagung itu sebenarnya kan bisa diprediksi kapan waktunya jagung itu akan apa, akan, akan kurang, kapan akan dia akan dipanen. Nah, jadi kita harapkan nanti ke depan, Pak, Pak Mendag dan Pak BULOG, nanti bisa diatur, Pak. Pak BULOG *kan* dari IPB, *Insyaallah* ya, Pak, ya. Nah, itu kan lebih pahamlah nanti waktu-waktunya sehingga tidak terjadi seperti kemarin, harga sampai 9.000. Nah, jadi itu yang membuat biaya produksinya, ayam dan telur juga sangat tinggi sekali.

Yang kedua, Pak, tentang harga ayam dan telur. Jadi kalau harga ayam dan telur itu memang mengikuti harga pakan, memang karena memang 50%-nya itu harga biaya produksi pokok dari jagung. Harapan kita, jagung nanti bisa stabil. Yang kedua, nanti kita harapan juga, Pak, mohon dibantu ke Bapanas supaya harga acuan produsennya juga bisa naik, Pak, karena apa? Karena dengan harga sekarang yang, yang terutama daging, Pak, daging dan telur itu harus biaya keekonomian sekitar 24 sampai 26 di *farm*, Pak, nah, itu yang mohon nanti bisa dibantu. Jadi harga karkas kalau ayam ya di 39 sampai 40. Jadi, Pak Mendag, mungkin itu harga yang wajar, Pak, 39 sampai 40 itu, Pak, bukan harga yang apa yang murah, itu bukan harga yang mahal tapi harga yang wajarnya memang segitu untuk harga ayam, Pak, dan juga harga telur wajarnya memang di pasar sekitar 28 sampai 30.

Nah, mungkin itu saja dari saya, Pak, mohon nanti dibantu untuk supaya ke depan, baik ayam dan telur itu bisa sama-sama untung, peternak untung dan konsumen tidak mengalami apa, ke, keberatan juga, sama-sama jalan, nah, itu mungkin perlu kerja sama semua pihak.

Terima kasih.

*Akhirkalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Yang terakhir, temannya Menteri Agraria dan Tata Ruang yang baru, AHY, sekarang enggak boleh panjang-panjang, Pak, nanti ditegur sama Menteri Pertahanan. Silakan, Pak Herman Khaeron.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Pak, temannya Mendag juga itu, Pak.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Terima kasih, Pak, Pak Ketua

**Yang saya hormati Pak Menteri, dan
Seluruh para Direksi yang hadir pada hari ini,
Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati,**

Pertama, memang tidak ada satu pun menteri ataupun satu pun direksi yang saya kira ingin prestasinya tidak baik. Artinya bahwa upayanya pasti maksimal, upayanya, ikhtiarnya pasti sangat keras, Pak Menteri pasti berupaya sangat keras, keliling pasar saya lihat di medsosnya, meskipun kadang-kadang *Tiktokan, gitu*. Jadi upayanya keras. Dan seluruh direksi juga upayanya keras. Dan pada situasi instabilitas harga, tentu dalam pandangan saya, memang saya sepakat jadi tugas negara. BULOG enggak bisa *disalahin*, kalau BULOG suruh beli, suruh beli gabah masyarakat yang pada akhirnya rugi, enggak bisa. BULOG harus mendapatkan penugasan. Kecuali kalau dalam ratas, negara menugaskan, "BULOG, beli gabah, Anda 1 juta ton", pasti beli itu BULOG, pasti beli, Pak Bayu, ya?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pertanyaannya, Pak, untuk tidak mengomentari pendapat sesama anggota, Pak.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Pak Khaeron, Pak Khaeron.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Saya nanya ke Pak Bayu.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Saya harus *tanggapin*, saya harus *tanggapin*. Jadi BULOG itu, Pak Khaeron, BULOG itu sudah ada tugas untuk membeli. Yang dia tidak mampu lakukan adalah ketika harga naik, dia mematok harga yang rendah. Jadi tidak ada

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Justru itu saya ingin bicara masalah.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Maka silakan bertanya *aja*, Pak. Apa yang ditanyakan.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Oleh karenanya, saya memberikan solusi.

Pak Bayu, Pak Mendag,

Hidupkan kembali raskin, apa pun bentuknya, sehingga begitu ditugaskan ada *buffer* stok nasional, ada ditugaskan berapa besar harus memiliki beras yang ini dibeli oleh pemerintah, oleh negara, maka berkewajiban untuk menstabilkan harga, baik di tingkat konsumen maupun di tingkat produsen *gitu*, maksud saya ini, jadi saya tidak mengkonter siapa pun, tetapi ini yang harus dibicarakan. Ya kalau, kalau tidak pernah membicarakan solusi permanen, pasti akan ketemu masalah ini, pasti akan ketemu persoalan dengan persoalan harga, pasti ketemu, karena tidak ada solusi permanen.

Kalau hanya operasi pasar, impor, melakukan operasi pasar dengan beras BULOG dengan beras RNI, tidak akan selesai persoalannya *gitu*, jadi harus ada solusi permanen. Dan saya setuju bahwa stabilitas harga itu adalah di tingkat konsumen dan di tingkat produsen. Nah, oleh karenanya harus ada mekanisme dan tata cara. Oke lah, kalau raskin sudah di rubah menjadi BPNT, apakah ini menjadi kecelakaan sejarah atau tidak, menurut saya oke lah, ini niat memperbaiki. BPNT-nya jangan dilepas *dong* dari BULOG, BPNT-nya kembalikan ke BULOG, supaya BULOG punya bisnis *as usual*-nya yang setiap saat ini bisa mereka jual kepada publik, kepada rakyat, pada sisi lain beri kewajiban, BULOG juga harus membeli gabah dari masyarakat, berapa persen misalkan kemampuan BULOG, sehingga juga tidak menimbulkan harga yang terlalu besar di tingkat pasar. Ini yang harus kita bicarakan *gitu*.

Saya paling mudah memang untuk menyalahkan, saya tahu persis, saya 8 tahun menjadi Ketua Panja beras, *kok gitu*. Kalau selama tidak ada solusi permanen terhadap bahan pokok ini, ya akan terjadi terus, setiap mau Lebaran, setiap mau Ramadan dan Idul Fitri, apalagi sebelum Idul Fitri dan Ramadan ada pemilu, mungkin juga konsumen di pemilu lebih besar justru.

Pak Menteri harusnya mengeluarkan data *dong*, mengeluarkan data, seberapa besar sesungguhnya permintaan terhadap beras pada waktu pemilu dibandingkan dengan pada waktu Ramadan dan Idul Fitri, coba dibandingkan.

Kalau, kalau pada waktu pemilu kemarin permintaannya juga tinggi, bahkan *double* permintaan ya, *double demand* terhadap Ramadan dan Idul Fitri maka ya ini pasti harga akan, akan, akan naik terus dan tidak stabil *gitu*. Nah, ini tolong juga dikeluarkan data ini, sehingga kita bisa mengukur, oh tingkat kenaikan harga bukan hanya persoalan El Niño, karena El Niño di *cover* dengan impor tapi di *cover* apa, terjadi juga persoalan-persoalan lain.

Yang kedua, dalam pandangan saya, solusi permanen ini memang harus benar-benar dibicarakan pada level tertinggi. Enggak bisa, enggak bisa BULOG hari ini, enggak bisa, ini harus diangkat ke level yang lebih tinggi, harus menjadi keputusan presiden. Presiden harus memutuskan kebijakan BULOG kembali *buffer* stok 3 juta setiap tahun, uangnya dianggarkan, kemudian ada program yang *continue* yang ini juga untuk menstabilkan harga di tingkat pasar. Saya tidak yakin kalau RNI, kalau PTPN, apalagi perdagangan Indonesia dan lainnya, saya tidak yakin mau rugi *gitu*. Kalau tidak ada penugasan negara, tidak ada penugasan pemerintah, saya yakin mereka tidak mau rugi, karena mereka bisnis, mereka usaha *gitu*. Enggak mungkin Pak Frans membeli beras 8.000 dijual 7.500, enggak mungkin. Kecuali penugasan. Pak Mendag harusnya mengangkat persoalan ini ke level yang lebih tinggi dan dibicarakan, agar ini bisa benar-benar bisa dilaksanakan.

Yang ketiga, di mana lokasinya? Ya ini bisa melalui dana cadangan pangan di APBN. Kalau enggak ada APBN-nya, enggak bisa juga. Jadi hajat tahunan kenaikan harga, ketidakstabilan harga setiap tahun ini akan terjadi *gitu*. Nah, oleh karena itu saya ingin, ingin ada solusi *gitu* pembicaraannya. Betul bukan pembelaan diri, tapi ada solusi. Kalau ada solusi, ya dibicarakan di sini, berapa sebetulnya butuh APBN setiap tahun untuk bisa menstabilkan harga pangan pokok masyarakat ini. Supaya tadi, arah dan tujuannya, stabil di tingkat konsumen, stabil di tingkat produsen, supaya petani juga mereka merasa bahwa harganya cukup ekonomis untuk tetap bisa *survive* dan mereka tetap semangat untuk menanam di sektor pertanian ya.

Nah, dana cadangan ini bagaimana di APBN? Ya ini menjadi keputusan politik. Kalau pemerintah mengajukan di DPR-nya, ya mari kita perjuangkan, bahwa dana cadangan yang dulu dana cadangan itu dalam bentuk raskin 22 triliun, sekarang sudah enggak ada lagi. Sudah ada di Bansos, sudah ada di BPNT. Nah ke mana sekarang harus, harus kita cari lagi? Ya tinggal *dibalikin aja gitu*, *dibalikin* dana itu, Pak Menteri, nanti coba dibicarakan, *dibalikin* lagi ke BULOG, kemudian dijadikan sebagai dana cadangan pangan, termasuk di dalamnya adalah penggunaan beras pemerintah untuk sektor bencana alam. Jangan sampai, ini juga Pak Bayu, temuan saya, kemarin banjir besar di Cirebon dan saya dengan sekemampuan saya tentu saya memberikan bantuan. Yang ironisnya adalah

beras cadangan pemerintah untuk bencana, mekanismenya terlalu panjang, dibutuhkan *tuh* hari ini, hari ini rakyat butuh makan, butuh dapur umum *gitu*. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa beras cadangan pemerintah bencana untuk kabupaten sudah habis, maka harus mengajukan dulu ke provinsi, dari provinsi mendapatkan persetujuan dulu di pusat, mungkin sekitar 2-3 hari proses, orang sudah kelaparan, *gitu*. Tolonglah mekanisme ini dibicarakan juga di tingkat pemerintah, bahwa akuntabilitas itu bukan karena persoalan waktu panjang, akuntabilitas itu adalah betul-betul memang program dijalankan dengan tepat sasaran dan ya dijalankan secara benar *gitu*. Nah, oleh karenanya ini harus diubah *gitu* ya.

Yang terakhir, saya juga tidak ingin panjang lebar. Pak Menteri, ini *kan* susah kita ini menjadi dualisme antara Kementerian Perdagangan dengan Bapanas, apakah tingkat koordinasinya sangat baik, kemudian diputuskan bersama? Karena *kan* dulu harapannya Bapanas itu *kan* ada di Komisi VI, bisa sama-sama kita membahasnya bersama di sini. Tapi *kan* kemudian pindah di Komisi IV, yang kita tidak pernah tahu apa yang dibahas oleh Bapanas di Komisi IV. Padahal juga mitra kerja BUMN terkait dengan pangan juga ada di Komisi VI, sehingga kebijakan-kebijakan Bapanas juga kita tidak pernah tahu, apa yang kemudian bisa mendukung, mem-*backup* terhadap pelaksanaan kinerja di BUMN. Atau hubungan kinerja apa yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan kemudahan kepada rakyat melalui kebijakan Bapanas, ini *kan* enggak pernah tau, mudah-mudahan nanti kita bisa sepakat bahwa kalau Pak Ario Bimo masih di Komisi VI, bisa dikembalikanlah kepada Komisi VI. Supaya apa? Supaya kebijakannya *nyambung gitu*, kalau sekarang *kan* enggak *nyambung gitu*.

Nah oleh karenanya, ini juga menjadi bahan pertanyaan saya, apakah memang koordinasi ini baik atau tidak, sehingga betul-betul Bapanas ketika institusi ini berdiri fungsi dan tugasnya memberikan dukungan penuh terhadap hak, terhadap kebutuhan rakyat banyak.

Yang terakhir sekali, Pak Ario Bimo, saya tidak bermaksud ya untuk mem-*benchmark* sebetulnya, saya hanya ingin bahwa pemerintah ada solusi permanen, ada solusi permanen yang bisa disampaikan di sini, bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, pada waktu terjadi kenaikan harga, semuanya turun, semuanya melakukan operasi pasar, semuanya melakukan intervensi pasar, pasar murah, padahal hari ini mulai panen, rakyat mulai panen *nih*, petani mulai panen. Petani itu kalau harga tinggi, dia senang karena harganya juga tinggi, tapi kalau kemudian diintervensi lagi, petani, giliran panen duluan *kok* harganya turun *gitu*, harganya *kok* menjadi murah *gitu*. Nah, ini yang kemudian semangatnya turun kembali. Silakan ditawarkan oleh seluruh *stakeholders* yang hari ini hadir, apa sesungguhnya solusi permanen sehingga kita rumuskan solusi permanen ini, dibahas baik di tingkat Pemerintah maupun di DPR, sehingga menjadi solusi politik yang ini nanti bisa menjadi solusi permanen ke depan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Kami persilakan dari meja Pimpinan.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, makasih, Pak Bimo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama, saya ingin menyoroti tentang beras terlebih dahulu. Rasanya kita perlu ada perhitungan baru, berapa harga beras yang rasional saat ini. Pemerintah dan masyarakat harus siap dengan perhitungan yang lebih rasional, sebenarnya yang layak bagi keseimbangan antara produsen dan konsumen itu, berapa harga beras yang sesungguhnya. Karena menuntut harga beras yang selalu murah, itu juga tidak adil bagi petani, kecuali Pemerintah punya uang yang cukup banyak untuk melakukan subsidi harga.

Coba kita bayangkan, kita berada pada posisi para petani, di saat biaya produksi pertanian itu sudah naik dan di saat barang-barang yang lain itu juga mengalami inflasi yang berkepanjangan, artinya yang *continue*, harga beras selalu dituntut untuk berada pada kisaran yang dalam ukuran masyarakat murah dan murah, padahal biaya produksinya sudah naik dan perbandingan dengan harga-harga yang lain, perbandingan relatif dengan harga lain, itu juga sudah naik. Jadi kita mesti bersiap dengan keseimbangan harga baru beras, berapa yang rasional. Karena itu, Pak Menteri, penting bagi Pemerintah untuk bisa menghitung secara rasional berapa harga beras yang layak untuk keseimbangan antara produsen dan konsumen.

Ini juga berlaku tentang HET. HET kita enggak rasional, Pak Menteri. Bayangkan, harga beras dari, harga gabah dari sawah, harga kering panen, HKP, itu waktu itu sudah 7.200 harga kering panen. Tapi HET-nya dipatok 10.900, padahal harga beras dibandingkan harga kering panen itu, gampang saja menjumlahkannya, pokoknya berapa harga kering panen, kalikan dua, itulah harga beras yang sesungguhnya. Kalau harga kering panennya harga dari sawah itu 7.200, itu berarti harga beras akhirnya, produksi, produksi akhirnya itu berarti sekitar 14.200. Sementara HET-nya masih 10.900. Siapa pun tidak mau, produsen siapa pun tidak mau merugi, itu. Karena itu kalau tadi disebutkan oleh rekan-rekan, ada kelangkaan beras di pasar modern, di retail-retail modern, ya pasti, karena produsen beras enggak mau rugi, mana ada orang dengan biaya produksi 14.400, disuruh menjual dengan HET yang jauh lebih rendah dari itu. Akhirnya produsen beras, yang itu lebih patuh di pasar modern, tidak mau dan membatasi diri untuk menjual di retail-retail modern.

Kalau di pasar tradisional, saya jamin beras enggak akan ada kelangkaan. Saya, mohon maaf, saya biasa belanja sendiri saya, Pak Anam tahu saya biasa belanja sendiri di pasar. Jadi saya jamin di pasar tradisional tidak ada kelangkaan beras, yang ada kelangkaan beras di retail modern, karena mereka patuh pada HET, yang HET-nya itu jauh lebih rendah daripada yang seharusnya. HET ini juga *problem, problem*, Pak Menteri. Jadi mohon juga di bisa ditinjau, ada kebijakan yang lebih fleksibel terhadap HET, terutama yang patut dipertanyakan adalah HET untuk beras premium. Buat apa HET di beras premium, apa urgensinya? Yang membeli beras premium itu rata-rata adalah kelas menengah ke atas, yang itu sebenarnya tidak peka terhadap harga. Yang peka terhadap harga itu adalah kalangan menengah ke bawah, untuk beras. Kalau untuk kalangan menengah ke atas, jangankan beras yang harganya sekitar 16.000, 17.000 yang premium, beras porang yang harganya 90.000, kadang dibeli oleh mereka.

Maksud saya, untuk yang premium itu, tolong juga supaya ada ruang bagi petani untuk menikmati harga yang baik, *toh* yang membeli adalah kalangan menengah ke atas. Dan ini juga bisa meningkatkan inovasi-inovasi dari produksi beras, dari produsen beras. Artinya kalau mau lebih putih, *diswept* lagi, itu inovasi-inovasi untuk kepentingan beras premium-premium dan menurut saya HET di beras premium perlu untuk dievaluasi supaya petani mendapatkan harga yang layak juga. Untuk beras *medium*, silakanlah itu di ada HET, tapi juga meski, mesti rasional agar HET-nya itu juga dipatuhi oleh para produsen beras.

Yang kedua, tentang, ini ada aspirasi ini, aspirasi ini dari Probolinggo, Pak Menteri. Selain beras, ada bahan pokok lain yang problematik yaitu masuknya impor yang enggak tahu kita legal atau tidak legal, bawang merah yang cukup banyak di pasaran, yaitu bawang merah dari Kalimantan, maaf, dari Thailand, sarasannya banyak sekali di Kalimantan. Saya ada dokumen-dokumen video-videonya, bawang merah dari Thailand. Untuk bawang merah berbeda sekali dengan bawang putih, bawang putih kita tidak memproduksi dengan hasil yang maksimal ya, tetapi bawang merah di Nganjuk, Dapilnya Pak Hakim, sampai Kediri, menjadi produsen beras, dapil saya, maaf, produsen bawang merah di Probolinggo dan sekitarnya, bawang merah berlimpah, di Brebes bawang merah berlimpah, tetapi ada bawang merah enggak tahu *gimana* mekanismenya, membanjiri pasar di Kalimantan, yang orang Probolinggo biasanya satu pedagang itu sebulan 100 ton mengirimkan bawang merah ke Kalimantan, hari ini berhenti total, tidak mengirimkan bawang merah Kalimantan akibat masuknya bawang merah ilegal dari Thailand. Entah ilegal entah legal kita enggak tahu, tapi selayaknya kalau itu legal, harusnya bisa diberhentikan.

Tentang BULOG. BULOG ini ya kalau skema pemerintah masih seperti sekarang, seperti yang dikatakan Pak Herman Khaeron, BULOG pasti tidak bisa berbuat banyak. BULOG sekarang tidak punya *outlet captive* sebagaimana dulu ada raskin atau rastra. Sejak bansos beras itu digantikan, bahkan bisa dengan tunai, maka BULOG tidak punya *outlet* secara pasti. Kalau BULOG dituntut terus-menerus untuk menyediakan beras dengan

harga yang murah, membanjiri gudang-gudang BULOG, sementara tidak ada jaminan keluarnya, ya pasti BULOG bisa bangkrut.

Karena itu perlu komunikasi yang baik di antara kementerian, di level yang tinggi, bagaimana tadi disebut oleh Pak Herman Khaeron, sebagai solusi permanen tadi itu. Kalau enggak, ya jangan terlalu membebani BULOG dengan ide yang macam-macam, kecuali pemerintah menanggung dalam bentuk penugasan-penugasan, pembiayaannya di tanggung oleh pemerintah, selisih harganya disubsidi oleh pemerintah. Kalau itu bisa dilakukan, pemerintah mau melakukan subsidi harga, termasuk risiko-risiko kerusakan kalau beras itu ada di gudang terlalu lama, ya silakan, BULOG bisa melakukan pekerjaannya dengan baik untuk mem-*backup* harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

HPP juga begitu, HPP yang terlalu murah, harga pembelian pemerintah terhadap gabah dan beras dari petani yang terlalu murah, juga pasti menyulitkan BULOG dan tidak menyejahterakan petani.

Yang ingin kami tekankan di kesempatan kali ini, mari kita menjaga keseimbangan yang baik antara produsen dan konsumen. Dan kami berharap betul pemerintah menghitung ulang, kira-kira berapa harga beras yang layak bagi keseimbangan tersebut. Dapil kami dan saya yakin masyarakat Indonesia masih banyak sekali petani yang juga pengen sejahtera, tidak hanya gaji PNS saja yang pengen naik, tapi juga para petani yang sudah bersusah payah itu juga ingin meningkatkan kesejahteraannya.

Terima kasih, Pak Pimpinan, Pak Bimo.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Demikian pendalaman dari kawan-kawan, Pak Menteri dan jajaran Direktur Utama BUMN Pangan, yang intinya dari kawan-kawan tadi bahwa mengisi perut 270 juta rakyat Indonesia ini tidak bisa kita lepas dengan mekanisme pasar atau sistem yang liberal. Negara harus mengendalikan bagaimana hal-hal ketersediaan kebutuhan pangan ini menjadi satu hal yang sangat penting dan tentunya krisis bisa karena memang ketidakmampuan kita sendiri menjaga kondisi pangan kita atau karena faktor-faktor eksternal yang tidak bisa terkendali. Ya masalah musim misalnya, tapi itu harus kita antisipasi betul-betul terutama di hari-hari yang seperti saat ini, di bulan puasa dan menjelang Lebaran, itu harus betul-betul dipersiapkan. Tadi teman-teman menyampaikan, terutama antisipasi, antisipasi-antisipasi terhadap gejolak harga yang ini gejolak yang sudah tidak normal, sehingga emosi kawan-kawan tadi, beberapa, menyampaikan yang terlalu ekspresif itu tidak lepas dari situasi suasana batin yang mereka lihat di lapangan. Dan kita berharap, hal-hal itu tentunya bisa teratasi terkait dengan situasi yang meningkatnya

beberapa kebutuhan pangan terutama beras, daging, dan kebutuhan lainnya di bulan puasa Ramadan ini.

Maka kami berharap, ketersediaan atau defisit dari beberapa kebutuhan bahan pokok dan kenaikan harga yang tinggi di masyarakat, akan, akan bisa direncanakan secara baik, termasukantisipasi kalau *toh* itu benar-benar harus dilaksanakan dengan impor, karena tugas pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan, bisa menunjuk BUMN Pangan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pangan, baik itu ekspor maupun impor untuk menjaga situasi stabilitas pangan nasional.

Demikian, kami persilakan rapat akan kita tutup kurang lebih jam 2, sebelumnya kami beri kesempatan Pak Menteri Perdagangan, Pak Direktur BULOG, maupun Pak Direktur Utama ID Food maupun PTPN untuk memberikan respons atas pertanyaan dan pendalaman dari kawan-kawan, waktu dan tempat kami persilakan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Baik, Pak Ketua.

Pimpinan yang terhormat,

Terima kasih, wajah Pimpinan kelihatan cerah-cerah ini, kayaknya lolos semua, Pak Haikal terang mukanya, kalau di sini agak buram, banyak enggak lolos. Kami akan jawab lengkap tercatat, tertulis, Ketua, tetapi ada beberapa hal penting yang perlu saya jawab.

Pertama, tadi informasi, terima kasih, Pak Ketua, Pak Sarmuji, ada bawang merah dari luar negeri itu saya juga baru dengar *gitu*, kalau berkenan nanti bareng-bareng *aja* kita hari Jumat atau hari apa kita datangi, Pak, kita cek *gitu*, karena memang tidak ada, belum pernah juga ada impor bawang merah *gitu*, nanti kita lihat sama-sama apa yang terjadi.

Yang kedua, tentu untuk menghadapi ini semua, pemerintah melakukan berbagai cara, Pak. Memang betul terjadi perubahan iklim, tidak hanya kita. Dan harga produk-produk makanan itu tidak hanya di kita naik. Beras saja misalnya waktu saya baru jadi menteri itu harganya 460 dolar per ton, sekarang sudah hampir 700, Pak, itu juga dapatnya tidak mudah *gitu*, karena berbagai negara juga melarang karena produksinya turun. Tentu solusi permanen sudah banyak yang dikerjakan, enggak cukup waktu saya kira untuk menjelaskan. Tapi sekali lagi, teorinya kan *supply and demand* ya, panennya pindah waktu, pasti suplainya berkurang, karena suplainya berkurang, kalau kita mintanya itu terus, maka harga akan naik, termasuk tadi di retail modern itu karena sudah ada HET, harga naik terus, mereka enggak, bukan kosong, memang enggak mau beli lagi, karena harganya sudah menjauhi melampaui HET. Misalnya HET itu 69.000 per 5 kilo, harga pasaran sudah sampai 90.000, otomatis retail modern tidak mau. Ada yang mau, tapi

dia risiko menjual di atas harga eceran *gitu* dan juga itu biasanya sedikit yang mau.

Oleh karena itu, BULOG mengisi retail-retail modern itu dengan beras SPHP dan beras *medium* lainnya, itu yang pertama, Pak. Tetapi waktu dekat saya kira tadi KaBULOG mengatakan, memang harga beras dalam negeri sudah tidak naik, turun relatif, karena masih kecil turunnya, antara Rp50,00, Rp100,00, tapi sudah mulai, karena produksi sudah mulai ada, Pak, bulan Maret ini kan sudah mulai panen, tapi panennya belum panen raya. Panen raya itu bulan depan sampai bulan Mei *gitu*, nah itu mengenai beras.

Sekarang bansos, tadi banyak sekali yang kita bahas, saya juga berkali-kali tadi ditanya soal bansos ini. Begini, Pak, teman-teman Komisi VI tugasnya memang untuk mengkritisi pemerintah, buat kami enggak ada masalah, dulu juga saya begitu, tapi saya *kan* bisa menjelaskan, diterima apa tidak, terserah Bapak-bapak yang terhormat.

Kalau panen kita bergeser, Pak, petani enggak *nanam* beras, berarti petani itu enggak punya beras. Oleh karena itu, Pak, kalau Bapak-bapak Anggota DPR bagi beras, pasti diserbu. Artinya banyak masyarakat kita yang kesulitan. Oleh karena itu bansos diperlukan, apakah pemilu atau tidak pemilu, *wong* rakyatnya enggak *nanam*, enggak *nanam* padi, enggak panen pasti enggak punya, *masak* karena pemilu terus kita *stop*, itu. Tapi kita boleh beda pandangan, tapi kan saya punya hak untuk menjelaskan itu yang terjadi di pemerintah, bahwa akibat itu ada keuntungan, itu soal lain. Tapi kira-kira itu intinya yang terjadi, Pak Aria Bima. Karena sekali lagi, orang enggak *nanam* padi, susah, *nanam aja* tidak, bagaimana panen, dia enggak punya, Pak. Oleh karena itu, Bansos ditambah, termasuk bantuan Elnino yang nilainya 300 sampai 400.000 itu, Pak, itu yang kedua.

Yang ketiga, apa saja *sih* yang dilakukan oleh pemerintah? Pak, Menteri Dalam Negeri itu, tidak hanya saya, Menteri Dalam Negeri itu tiap minggu, Pak, rapat mengenai beras, mengenai beras, tiap minggu ya. Ini melibatkan bupati, melibatkan gubernur, melibatkan kapolda, sampai apa namanya seluruh kementerian terkait, memonitor. Memang ada dana BTT, apa, Bantuan Belanja Tak Terduga, cuma memang tidak mungkin kalau harus menanggulangi kenaikan harga beras, tapi kalau yang lain-lain itu biasanya transportasinya dan lain-lain itu ada, sebetulnya *slot*-nya sudah disediakan, cuman kalau kenaikannya seperti kemarin, harga beras dalam negeri memang produksinya tidak ada atau kurang, itu tidak mungkin.

Juga untuk solusi permanen, karena, Pak Ketua, 20 tahun yang lalu saya duduk di sini memang hampir sama soalnya ya. Apa yang terjadi hari ini dengan 20 tahun yang lalu, saya juga malu sebetulnya, sekarang saya beda tempat duduk, hampir sama Pak, bahkan lebih, lebih berat. Dulu kita impor gula itu, Pak, enggak sampai 1 juta. Pak Aria Bima masih sama saya dulu di sini, sekarang itu kita impor gula 6 juta, Pak, *gitu*. Nah memang ini harus di tangan langsung dipimpin presiden, Pak, menurut saya, harus dipimpin presiden langsung mengenai kedaulatan pangan ini. Memang kita bisa beli, punya uang bisa beli, tapi sekarang belum tentu, Pak, punya uang belum

tentu bisa beli. Kalau pangan seperti ini, India enggak mau jual, yang lain belum tentu mau. Ya kita, saya, ke Tiongkok berkali-kali, enggak mau jual juga, padahal teman baik. Jadi bisa saja satu saat kita punya uang, enggak bisa beli *gitu*. Oleh karena itu, menurut saya, kedaulatan pangan itu, saya *ngomong* di sini 20 tahun yang lalu, sama, harus, tidak boleh tawar-tawar, berapa pun biaya ongkosnya harus kita kerjakan. Nah oleh karena itu saya kira ini *kan* pemerintahan tinggal 6 bulan, yang akan datang, pemerintahannya Pak Haekal ini, harus bisa menuju swasembada pangan.

Itu, Pak, yang, yang terakhir mengenai minyak goreng. Minyak goreng, *kan* saya jadi menteri sudah hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun, dulu 14.000, ini 2 tahun 14.000, memang seharusnya naik, seharusnya, karena inflasinya sudah enggak sesuai, Pak, *gitu*, tapi kita masih belum, tunggu dulu Lebaran lah *gitu*. Oleh karena itu benar kalau dikatakan HET tidak sesuai dengan keadaan, iya, tapi kalau kita naikkan sekarang, memicu dia, *gitu*, memicu harga lebih tinggi lagi.

Nah yang kedua, kenapa kurang DMO-nya, apakah ada sanksi terhadap perusahaan? Perusahaannya lebih, Pak. Jadi misalnya dia punya jatah untuk ekspor itu misalnya 10 juta ton, ekspornya ini lesu, Pak, lesu, jadi ekspor CPO ini turun banyak. Oleh karena itu DMO-nya lebih, kelebihan *gitu*, melebihi kuotanya sekian, dia lebih banyak, stoknya lebih banyak. Bahkan sampai hari ini kalau saya enggak salah, hampir 6 juta ya, 5,9 juta jatah dia untuk ekspor yang tidak *dikerjain*, jadi dia sudah punya jatah untuk ekspor, enggak *dikerjain* karena ekspornya lagi menurun *gitu*. Jadi memang perusahaan enggak salah, karena kuota dia masih banyak yang, yang belum dilaksanakan.

Saya kira itu secara singkat, yang lainnya nanti kami lengkap akan memberikan jawaban tertulis kepada Pimpinan dan Anggota yang terhormat.

Terima kasih.

Selamat siang,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Demikian respons dari Kementerian Perdagangan, apakah akan ada tambahan dari Direktur RNI, Direktur Perum BULOG, PTPN, ya? Sekali lagi, bahwa

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Bapak, nanti akan, mereka katanya cukup, akan memberikan jawaban tertulis semuanya.

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Ini *kan* sudah lewat kampanye ya, Pak, program-program Bapak-bapak ini *kan* bagus ya, pasar murah dan lain-lain itu tadi, ini kampanye sudah lewat, apakah program ini tidak bisa dilakukan di dapil kami, Pak? Nah, ini karena *kan* selama ini *kan* kita tidak diberikan karena kita masih dalam *political* inilah. Sekarang sudah selesai, nah sudah selesai, kita pikirkan rakyat sekarang ini *kan gitu*, Pak, apakah kami bisa meminta program-program yang cukup baik ini untuk rakyat, bisa kita bawa ke dapil kita, Pak.

Terima kasih.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Bisa Bu, bisa, lebih cepat lebih baik.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya.

Kawan-kawan,

Kita akan segera menutup rapat hari ini dan kita akan buat kesimpulan-kesimpulan rapat sebagai langkah awal kita untuk terus mengawal hal yang terkait dengan ketersediaan dan harga pangan nasional.

Perlu kami informasikan di rapat ini juga bahwa, besok hari Kamis, 14 Maret 2024 Pukul 13.00 WIB akan diadakan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi XI masih terkait dengan masalah ketersediaan dan kelangkaan pangan sebagai tindak lanjut beberapa hal yang disampaikan kawan pada rapat paripurna.

Kita melihat serius, DPR, situasi saat ini bukan hal yang normal atau gejala yang, yang rutin dan temporer, tapi ada sesuatu yang memang perlu kita seriusi di DPR, kita akan mengadakan rapat lintas Komisi yang akan langsung dipimpin oleh Pimpinan DPR. Demikian juga pemerintah yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan, bahwa lonjakan-lonjakan harga terjadi secara temporer itu hal yang biasa. Tapi untuk kali ini, Pak Menteri, kami berharap Pak Menteri Perdagangan lebih proaktif menginisiasi khususnya tekanan kepada presiden, *matur* kepada presiden, menyampaikan kepada presiden, sebagai pemerintahan kepada presiden, ini harus *president policy* karena situasinya sudah situasi yang tidak normal baik itu ketersediaan maupun harga-harga komunitas pangan kita.

Sebelum menutup, kami akan membacakan draf kesimpulan untuk jadikan kesimpulan, sekretariat saya minta untuk menampilkan.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan dengan menghadirkan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara / ID Food, Perum BULOG dan PTPN III Persero pembahasan terkait Persediaan Pangan Stok dan Harga Pangan. Rabu, 13 Maret 2004, 2024.

1. Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah agar memberikan langkah konkret yang tentunya nanti akan kita minta juga langkah konkret tersebut yang akan disampaikan Menteri Perdagangan dalam rapat-rapat berikutnya, memberikan langkah konkret dalam mengawasi keberadaan stok distribusi dan stabilisasi harga pangan dan bahan pokok khususnya pada bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri 2024/1445 Hijriah.

Intinya ada faktual *problem*, ada *problem* faktual dan ada *future*, yang *future problem* akan kita atasi secara lebih khusus terkait dengan *stakeholder* yang ada, faktual *problem* kita simpulkan dalam kesimpulan yang pertama ini, apakah bisa disetujui? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan agar mempersiapkan mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dijalankan pemerintah, serta dilaporkan kepada Komisi VI secara berkala terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan sehingga inflasi dan stok barang dapat dikendalikan.

Maksud secara periodik, supaya hal-hal yang terkait dengan keputusan politik Pak Menteri, itu bisa kita atasi secara bersama-sama, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Perum BULOG dan PTPN III agar mengawasi keberadaan stok distribusi dan stabilitas harga pangan dan harga bahan pokok dalam menghadapi bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri 2024/1445 Hijriah.

Ini secara khusus dan mendesak yang terkait dengan faktual *problem* tadi, ego sektoral saat ini memang perlu lebih dikesampingkan. Terkait dengan fungsi badan usahanya, Pak Dirut Utama ID Food/RNI, saya kira itu tetap bisa berjalan tapi juga ada opsional-opsional bagaimana RNI tidak hanya bicara masalah komersial, tapi juga bicara mengatasi situasi krisis pangan semacam ini, termasuk bagaimana dibutuhkannya uang kalau perlu memang hal yang harus dititipkan, karena dalam undang-undang, Kementerian Perdagangan bisa menunjuk BUMN untuk mengatasi hal-hal yang terkait dengan masalah pangan.

Demikian juga Direktur BULOG sebagai Direktur baru, perlu juga belajar, Pak, ya, 3 tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir ini memang BULOG relatif bisa menjaga ketersediaan dan harga pangan, mungkin Pak Buwas bisa dipanggil, entah itu terkait dengan harga pangan yang terkait beras

komersial, beras cadangan, dan juga terkait dengan beras bansos. Bagaimana kecanggihan Direktur BULOG untuk menggunakan tiga fungsi ini untuk terjaganya keberadaan beras yang pakai, bisa dipakai untuk hal-hal yang bersifat operasi pasar maupun beras-beras bansos lainnya. Ini yang terkait dengan kesimpulan ketiga.

4. Komisi VI DPR RI meminta Perum BULOG dalam melakukan importasi beras, importasi beras untuk memperhatikan momentum musim panen raya yang akan berdampak pada harga di tingkat petani.

Termasuk juga komoditas lainnya, seperti dikeluhkan kawan-kawan, tadi Pak Sarmuji terkait bawang merah dan yang lainnya. Situasi krisis pangan memang tidak bisa kita tidak melakukan impor untuk menangani persoalan *problem* faktualnya. Bagaimana mengurangi impor, *problem* jangka panjangnya, saya kira *roadmap* pangan kita harus benar-benar kita tata. Setuju ya?

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Dikoreksi *dikit* itu.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Monggo.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Yang poin 4.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya cabut.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Jangan importasinya dulu, jadi agar BULOG, Perum BULOG membeli gabah petani dulu.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

Perum BULOG dalam melakukan, Perum BULOG hendaknya melakukan penyerapan gabah atau penyerapan gabah ya, gabah petani gabah petani lokal, di masa panen, di masa panen ya, di masa panen dan bisa melakukan, *gitu* ya.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Jadi importasi itu ketika sudah tidak tersedia kebutuhan, kebutuhan lokalnya. Jadi kalau tidak tersedia beras dalam negeri, baru kita

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Penyerapan gabah petani lokal di masa panen, melakukan penyerapan gabah petani lokal hendaknya diprioritaskan, ya, diprioritaskan di masa panen, intinya itu ya, ya.

WAKIL KETUA RAPAT (FAISOL RIZA, S.S./KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mungkin Mas Bimo itu kalimatnya dibuat, “Komisi VI DPR RI meminta Perum BULOG untuk memprioritaskan penyerapan gabah petani lokal dan tidak melakukan impor di masa panen raya”.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya. “Dan tidak melakukan impor di masa panen raya”. Kalau puasa itu memang bahasanya lebih mengendap *gitu*, kalau *wong jowo* bicaranya *luwih wening*.

“Komisi VI DPR RI meminta Perum BULOG untuk memprioritaskan penyerapan gabah petani lokal dan tidak melakukan impor beras di masa panen raya”, setuju? Setuju. Bali, Bali *gimana* Bali, Bali oke ya, Pak Parta?

(RAPAT:SETUJU)

Komisi VI DPR RI, 5 meminta.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Pimpinan, Pimpinan, tadi berkaitan dengan yang nomor empat, saya ingin dapat respons dari BULOG, biar nanti ketika kita undang beli gabah petani, tidak banyak alasan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, setuju? Iya, setuju.

KETUA KOMISI VI / F-PKB (FAISOL RIZA, S.S.)

Respons yang ini atau respons yang?

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Yang nomor 4.

KETUA KOMISI VI / F-PKB (FAISOL RIZA, S.S.)

Oh bukan yang *mindah* orang *kan*?

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Yang nomor 4, ya yang nomor 4, itu nanti ketika kita undang, membeli beras petani, gabah petani, agar tidak banyak alasan BULOG, itu, Pak, prinsipnya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, Pak, Pak, pasti Pak Menteri Perdagangan menjamin, ya, dan,

5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Perum BULOG untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI.

Ini penting, Pak, untuk kita jadikan bahan untuk rapat-rapat berikutnya, karena situasi mengenai kesediaan pangan ini saat ini menjadi prioritas dari Komisi VI.

Demikian Bapak-Ibu dan Saudara sekalian, draf kesimpulan sudah kita jadikan kesimpulan rapat pada hari ini, sebelum kami tutup kami persilakan, Pak Menteri, ada *closing statement* yang bisa di sampaikan untuk menutup rapat hari ini.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Baik, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yang nanti bisa kita sambung di acara buka puasa bersama, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Dengan senang hati, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalau Pak Menteri enggak *ngundang*, nanti kita akan *ngundang*, Pak, Komisi VI.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Memang sekarang, Pak, sedikit saja, gabah kalau ada gabah yang tidak terbeli, tinggal kita diberitahu di mana tempatnya, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalau tidak ada gabah tidak terbeli, beritahu?

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Beritahu, agar segera dibeli dengan harga yang paling bagus.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nah itu, persoalannya terbeli, kemudian pihak BULOG tidak mau tidak membeli *gimana*, Pak?

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Harga pasar, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Harga pasar.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dibeli harga pasar, Pak, ya?

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Itu betul, Pak Menteri? Jadi harga pasar, Pak Menteri, Bagus.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Karena BULOG juga berperan sebagai apa, badan usaha untuk jual beras komersial, Pak, ya.

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI, Dirut Perum BULOG, dan Dirut PTPN III, beserta jajarannya.

Atas nama Pimpinan Komisi VI kami menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada kawan-kawan Anggota Komisi VI yang telah mengikuti rapat hingga selesai.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Mas Bimo, Mas Bimo 1 detik.

Kalau yang tadi nanti tidak dilaksanakan oleh, tanggung jawab Pak Menteri sama BULOG.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Menteri ini.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Panen ini saya akan undang BULOG, datang ke lapangan menyerap gabah petani. Iya pasti datang, tapi untuk membeli, untuk membeli gabah petani.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kita, kita datangkan ke Bali, kalau situasi apa yang seperti disampaikan oleh teman kita, Pak I Nyoman Parta.

Saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan, sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, demikian rapat pada hari ini bisa kami tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.01 WIB)

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001